

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN**

### **HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Auditing**

###### **2.1.1.1 Pengertian Auditing**

Dibawah ini ada beberapa pengertian audit oleh beberapa ahli dibidang akuntansi antara lain :

Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan tertentu. Sebagaimana definisi auditing yang dinyatakan oleh Sukrisno Agoes (2012:4) adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Alvin A. Arens, Elder dan Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dalam bukunya *“Auditing and assurance service, Pearson International Edition”* (2011:4) definisi *auditing* adalah :

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.*

Menurut Alvin A. Arens, Elder dan Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dalam

terjemahan bukunya "*auditing dan jasa assurance*" dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:4) definisi auditing adalah :

"*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen".

Dari definisi audit di atas menunjukkan bahwa audit merupakan suatu proses memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh orang yang independen dan berkompoten untuk menilai kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari beberapa defini *auditing* diatas, terdapat beberapa kata dan frase kunci agar mudah dipahami Alvin A. Arens dalam *auditing dan jasa assurance* (2011:4) dialihbahasakan oleh Herman Wibowo membahas istilah-istilah itu dalam urutan yang berbeda dengan yang muncul dalam deskripsi antara lain:

1. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan

Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti

Bukti (*evidence*) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencakupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang harus diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### 3. Orang yang kompeten dan independen

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental dan independen untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka.

### 4. Pelaporan

Tahap terakhir dalam proses auditing adalah menyiapkan laporan audit (*audit report*), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

#### **2.1.1.2 Pengertian Auditor**

Secara sederhana orang yang melakukan audit dapat dikatakan seorang auditor. Dibawah ini merupakan definisi auditor sebagai berikut:

Menurut Mulyadi (2011:1) pengertian auditor sebagai berikut:

“Auditor adalah akuntan publik yang memberi jasa audit kepada auditan

untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Arens, Elder, Beasles dalam bukunya "Auditing dan Jasa *Assurance*" (2011:5) dialihbahasakan oleh Herman Wibowo pengertian auditor, khususnya auditor independen sebagai berikut :

"Auditor independen adalah auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan".

Tujuan seorang auditor adalah menentukan apakah asersi yang telah disajikan oleh manajemen benar-benar wajar, maksudnya adalah menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, yang dimaksud kriteria yang telah ditetapkan adalah Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (*General Accepted Accounting Principles/GAAP*), (dalam Quinta Dyah Permatasari, 2008:20).

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Audit**

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012:10) Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

#### **1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)**

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia

serta standar pengendalian mutu.

## 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Audit) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya.

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012 ; 11-13) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

### 1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan

atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

## 2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun bagian internal audit.

## 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit *finding*) mengenai penyimpangan dan

kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

#### 4. Komputer Audit

Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul "*Auditing*"(2011:28), jenis-jenis auditor dikelompokkan sebagai berikut :

##### 1. Auditor independen

Auditor independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditor, investor, calon kreditor, calon investor dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

##### 2. Auditor pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Meskipun banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintahan, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah

auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

### 3. Auditor intern

Audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam organisasi.

Dari beberapa jenis auditor tersebut, auditor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah auditor yang berada di kantor akuntan publik yang biasa disebut akuntan publik. Dalam aturan etika kompartemen akuntan publik, akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Menurut Griffin dan Ebert (di Maryani dan Ludigdo, 2001), sikap dan perilaku etis sikap dan perilaku sesuai dengan sosial norma berlaku umum sehubungan dengan tindakan yang yang bermanfaat dan berbahaya. Jadi dalam hal etika profesi, sikap etika adalah sikap and behavior di sesuai dengan etika profesi.

Menurut Keraf (dalam Harahap, 2011: 17), etika yaitu:

"Etika adalah disiplin yang berasal dari filsafat yang membahas nilai-nilai moral dan norma-norma yang mengarahkan perilaku manusia hidup".

Sedangkan menurut Widiyanto Edi (2011) etika ialah :

“Ilmu yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk perbuatan orang sejauh dapat dipahami oleh pikiran manusia”.

Menurut Kode Etika Ikatan Akuntan Indonesia Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan untuk semua anggota, apakah mereka berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha, pada instansi pemerintah, serta seperti dalam dunia pendidikan di pemenuhan tanggung jawab profesional. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Kode menekankan pentingnya prinsip-prinsip etika untuk akuntan profesional dalam melakukan kegiatan.

Menurut etika kompartemen akuntan publik pada Standar Profesi Akuntan Publik (2014:1) mendefinisikan kantor akuntan publik (KAP) yaitu:

“Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berudaha dibidang jasa professional dalam praktek akuntan publik. Praktek akuntan public adalah pemberian jasa professional pada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar Profesional Akuntan Publik”.

Menurut UU RI No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, mendefinisikan kantor akuntan publik sebagai berikut:

"Kantor Akuntan Publik atau yang sidingkat dengan KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang ini".

Pada dasarnya, kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.(Amir Abadi, 2009:9).

#### **2.1.1.4 Standar Auditing**

Menurut PSAP 01 (2011: 150.1-150.2) Standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,

ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (IAPI, 2011:150.1 & 150.2)

## **2.1.2 Kecerdasan Spiritual Auditor**

### **2.1.2.1 Definisi Kecerdasan Spiritual**

Akhir abad ke-20, serangkaian data ilmiah terbaru, menunjukkan adanya kecerdasan jenis ketiga, yaitu kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan spiritual ini dipopulerkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Kecerdasan spiritual merupakan landasan untuk mengaktifkan *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotional Quotient* (EQ) secara efektif. Hanya mengandalkan penggunaan potensi Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional tanpa didasari kecerdasan spiritual tidak akan efektif dan efisien. Kecerdasan spiritual berfungsi

sebagai pengendali dan pemberdaya kecerdasan lainnya yang belum dioptimalkan kinerjanya (Budi Yuwono, 2008:36). Wujud dari kecerdasan spiritual ini adalah sikap moral yang dipandang luhur oleh pelaku ( Ummah dkk, 2003:43).

Kecerdasan inilah yang menurut para pakar sebagai para pakar sebagai penentu kesuksesan seseorang. Kecerdasan ini menjawab berbagai macam pertanyaan dasar dalam diri manusia. Kecerdasan ini menjawab dan mengungkapkan tentang jati diri seseorang, " *Who I Am* ". Siapa saya ? Untuk apa saya diciptakan ?

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall (2002) dalam Ludigdo dkk (2006), kecerdasan spiritual adalah:

“Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain”.

Sedangkan menurut Ginanjar (2005) Definisi mengenai kecerdasan spiritual adalah :

"Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif".

Menurut Khavari (2000) dalam Rachmi (2010) kecerdasan spiritual yaitu:

“Kecerdasan spiritual sebagai fakultas dimensi non-material atau jiwa manusia. Kecerdasan spiritual sebagai intan yang belum terasah dan dimiliki oleh setiap insan. Manusia harus mengenali seperti adanya lalu menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekad yang besar, menggunakannya menuju kearifan, dan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.”

Menurut Abdul Wahab & Umiarso (2011 : 52) dalam Panangian (2012) ,

kecerdasan spiritual adalah :

“Kecerdasan Spritual adalah kecerdasan yang sudah ada dalam setiap manusia sejak lahir yang membuat manusia menjalani hidup penuh makna, selalu mendengarkan suara hati nuraninya, tak pernah merasa sia-sia, semua yang dijalannya selalu bernilai. “

Sedangkan menurut Agustian (2001: 57) Kecerdasan spiritual yaitu :

“Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberikan arti bagi setiap perilaku ibadah dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang basedon alam atau terhadap manusia secara keseluruhan dan memiliki pemikiran integratif atau ketuhanan sebagai welas prinsip bahwa semua tindakannya hanyalah melayani Tuhan”.

Kecerdasan spiritual dapat mempengaruhi sikap etis melalui spiritual kecerdasan memungkinkan untuk wawasan dan understandingto menemukan makna dalam eksistensi seseorang, tempat untuk bertindak, berpikir, dan merasakan. Hal ini dapat terjadi karena sebagai makhluk Tuhan seseorang wajib untuk mengambil tindakan berdasarkan benar dan hati nurani yang baik bahwa ini adalah fungsi intelijen sebagai dasar untuk mempertimbangkan *actunethical* atau tidak harus dilakukan, sebagai bentuk kecerdaan spiritual ini moralitas luhur.

Kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama. Kecerdasan spiritual mendahului seluruh nilai spesifik dan budaya manapun, serta mendahului bentuk ekspresi agama manapun yang pernah ada. Namun bagi sebagian orang mungkin menemukan cara pengungkapan kecerdasan spiritual melalui agama formal sehingga membuat agama menjadi perlu.

### **2.1.2.2 Prinsip Kecerdasan Spiritual**

Prinsip- prinsip kecerdasan spiritual menurut Agustian (2001) dalam Rachmi (2010), yaitu:

a) Prinsip Bintang

Prinsip bintang adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua tindakan yang dilakukan hanya untuk Tuhan dan tidak mengharap pamrih dari orang lain dan melakukannya sendiri.

b) Prinsip Malaikat (Kepercayaan)

Prinsip malaikat adalah prinsip berdasarkan iman kepada Malaikat. Semua tugas dilakukan dengan disiplin dan baik sesuai dengan sifat malaikat yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan segala perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

c) Prinsip Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan adalah pada Agama Islam yaitu prinsip berdasarkan iman kepada Rasulullah SAW. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang sejati. Seperti Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin sejati yang dihormati oleh semua orang.

d) Prinsip Pembelajaran

Prinsip pembelajaran adalah prinsip berdasarkan iman kepada kitab. Suka membaca dan belajar untuk menambah pengetahuan dan mencari kebenaran yang hakiki. Berpikir kritis terhadap segala hal dan menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam bertindak.

e) Prinsip Masa Depan

Prinsip masa depan adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada "hari akhir". Berorientasi terhadap tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah

maupun jangka panjang, disertai keyakinan akan adanya "hari akhir" dimana setiap individu akan mendapat balasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

f) Prinsip Keteraturan

Prinsip keteraturan merupakan prinsip berdasarkan iman kepada "ketentuan Tuhan". Membuat semuanya serba teratur dengan menyusun rencana atau tujuan secara jelas. Melaksanakan dengan disiplin karena kesadaran sendiri, bukan karena orang lain.

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia memaknai bagaimana arti dari kehidupan serta memahami nilai tersebut dari setiap perbuatan yang dilakukan dan kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan seseorang dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup karena merasa sebagai bagian dari keseluruhan, sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki (dalam Fariah Zakiah, 2013)

Tanpa adanya kematangan kecerdasan spiritual sangat sulit bagi seorang auditor memikul tanggung jawab seperti apa yang disebutkan dalam Pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, serta untuk tidak menyalah gunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan amanah yang dimilikinya kepada jalan yang tidak dibenarkan. Sehingga akan berpengaruh terhadap hasil kinerja mereka (mutu dan kualitas audit) atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan dan manipulasi terhadap tugas yang diberikan (Jurnal Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan spiritual Terhadap Kinerja Auditor, 2009).

### 2.1.2.3 Implementasi Kecerdasan Spiritual

Tanda-tanda dari SQ yang telah berkembang dengan baik mencakup hal-hal berikut Zohar dan Marshall (2005:14) dalam Afria Lisda, 2009 :

a. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif)

Kemampuan bersikap fleksibel yaitu mampu menyesuaikan diri secara spontan dan aktif untuk mencapai hasil yang baik, memiliki pandangan yang pragmatis (sesuai kegunaan), dan efisien tentang realitas. Unsur-unsur bersikap fleksibel yaitu mampu menempatkan diri dan dapat menerima pendapat orang lain secara terbuka.

b. Tingkat kesadaran diri yang tinggi

Kesadaran diri yang tinggi, yaitu adanya kesadaran yang tinggi dan mendalam sehingga bisa menyadari berbagai situasi yang datang dan menanggapi. Unsur-unsur kesadaran diri yang tinggi yaitu kemampuan *autocritism* dan mengetahui tujuan dan visi hidup.

c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan

Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan yaitu tetap tegar dalam menghadapi musibah serta mengambil hikmah dari setiap masalah itu. Unsur-unsur kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan yaitu tidak ada penyesalan, tetap tersenyum dan bersikap tenang dan berdoa.

d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit

Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit yaitu seseorang yang tidak ingin menambah masalah serta kebencian terhadap sesama

sehingga mereka berusaha untuk menahan amarah. Unsur-unsur kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit yaitu ikhlas dan pemaaf.

- e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai

Kualitas hidup yaitu memiliki pemahaman tentang tujuan hidup dan memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Unsur-unsur kualitas hidup yaitu, prinsip dan pegangan hidup dan berpijak pada kebenaran.

- f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu

Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu yaitu selalu berfikir sebelum bertindak agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Unsur-unsur keengganan untuk menyebabkan kerugian tidak menunda pekerjaan dan berpikir sebelum bertindak.

- g. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal

Berpandangan Holistik yaitu melihat bahwa diri sendiri dan orang lain saling terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat memandang kehidupan yang lebih besar sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan, melampaui kesengsaraan dan rasa sehat, serta memandangnya sebagai suatu visi dan mencari makna dibalikinya. Unsur-unsur berpandangan holistik yaitu kemampuan berfikir logis dan berlaku sesuai norma sosial.

- h. Kecenderungan nyata untuk bertanya “mengapa?” atau “bagaimana jika?” untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar

Kecenderungan bertanya yaitu kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar unsur-unsur kecenderungan bertanya yaitu kemampuan berimajinasi dan keingintahuan yang tinggi.

- i. Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai “bidang mandiri”

Bidang mandiri yaitu yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi, seperti: mau memberi dan tidak mau menerima.

### **2.1.3 Kecerdasan Emotional Auditor**

#### **2.1.3.1 Definisi Kecerdasan Emotional**

Kecerdasan emosi pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer University of New Hampshire Amerika untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan (Joan & Paskah, 2004:262). Mr Goh Chok Tong perdana menteri Singapura sebagaimana dikutip oleh Patton (Aditya Wardhana, 2004:1) juga menyatakan bahwa "IQ yang tinggi saja tidak cukup, kepemimpinan bukan yang utama selain seni membujuk orang untuk bekerja mencapai tujuan bersama, ini semua membutuhkan keterampilan antara pribadi atau interpersonal dan kecerdasan sosial (EQ) yang tinggi", Aditya Wardhana(2004:42) kemudian menambahkan bahwa EQ berperan membantu IQ manakala kita perlu memecahkan masalah-masalah penting atau membuat keputusan penting.

Menurut Goleman (2000) untuk menjadi auditor yang mampu

melaksanakan tanggung jawabnya dengan menunjang tinggi etika profesinya, kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan 20%, sedangkan 80% dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kecerdasan lainnya salah satunya kecerdasan emosional.

Menurut Cooper dan Sawaf (di Agustian, 2001: 199) kecerdasan emosional yaitu :

"Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk akal, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh orang ".

Menurut Harmoko (2005), kecerdasan emosional dapat didefinisikan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya Peter Salovey (dalam Shapiro, 1997) menggambarkan kualitas emosional yang tampaknya penting keberhasilan kualitas ini adalah kemampuan *to recognize* emosi. Stenberg dan Salovey (dalam Shapiro, 1997) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenalinya Konferensi Internasional tentang Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis perasaan sendiri perasaan atau emosi yang muncul andhe mampu mengenali emosinya sendiri ketika ia memiliki sensitivitas tinggi atas perasaan mereka yang sebenarnya dan kemudian mengambil keputusan secara mantap. Menurut Arini (di Suryaningsum etal, 2009), *the ability* untuk mengelola emosi adalah kemampuan seseorang mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak meledak dan akhirnya mempengaruhi perilaku mereka dengan tepat. Sebagai

contoh, seseorang yang marah karena kemarahan dapat dikontrol baik tetap tanpa konsekuensi yang pada akhirnya menyesal di kemudian hari.

Menurut Ary Ginanjar (2001) dalam bukunya "Rahasia Sukses membangkitkan ESQ POWER" kecerdasan emosional yaitu

"Kecerdasan emosional adalah sebuah kemampuan untuk "mendengarkan", bisikan emosi dan menjadikannya sebagai sumber informasi maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai tujuan".

Dalam prakteknya untuk memikul tanggung jawab, seorang auditor tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan emosional dalam memotivasi dirinya, dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa ( Goleman, 2005).

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak yang positif. Kecerdasan emosional dapat membantu membangun hubungan dalam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan (Wibowo, 2002 dalam RM dan Aziza, 2006).

Salovey dan Mayer dalam Melandy dan Aziza (2006) mendefinisikan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi.

Menurut Goleman (2005) dalam Tikollah dkk (2006) memberikan definisi

bahwa:

“Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain”.

Kecerdasan emosional auditor menuntut dirinya untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain serta untuk menanggapi dengan tepat. Menerapkan dengan efektif kecerdasan emosional dalam pekerjaan sehari-hari seorang auditor akan mampu mengelola diri sendiri, menangani suatu hubungan serta kepandaiannya menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain.

### **2.1.3.2 Implementasi Kecerdasan Emosional**

Menurut Goleman (2007) membagi kecerdasan emosional menjadi lima bagian yaitu tiga komponen berupa kompetensi emosional (pengenalan diri, pengendalian diri dan motivasi) dan dua komponen berupa kompetensi sosial (empati dan keterampilan sosial). Lima komponen kecerdasan emosional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengenalan diri (*self awareness*)

Dimensi pertama adalah self awareness, artinya mengetahui keadaan dalam diri, hal yang lebih disukai, dan intuisi. Kompetensi dalam dimensi pertama adalah mengenali emosi sendiri, mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri, dan keyakinan akan kemampuan sendiri.

b. Pengendalian diri (*self regulation*)

Dimensi kedua adalah self regulation, artinya mengelola keadaan dalam

diri dan sumber daya diri sendiri. Kompetensi dimensi kedua ini adalah menahan emosi dan dorongan negatif, menjaga norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, luwes terhadap perubahan, dan terbuka terhadap ide-ide serta informasi baru.

c. Motivasi (*motivation*)

Dimensi ketiga adalah *motivation*, artinya dorongan yang membimbing atau membantu peraih sasaran atau tujuan. Kompetensi dimensi ketiga adalah dorongan untuk menjadi lebih baik, menyesuaikan dengan sasaran kelompok atau organisasi, kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan, dan kegigihan dalam memperjuangkan kegagalan dan hambatan.

d. Empati (*empathy*)

Dimensi keempat adalah *empathy*, yaitu kesadaran akan perasaan, kepentingan, dan keprihatinan orang. Dimensi keempat terdiri dari kompetensi *understanding others, developing others, customer service*, menciptakan kesempatan melalui pergaulan dengan berbagai macam orang, membaca hubungan antara keadaan emosi dan kekuatan hubungan suatu kelompok.

e. Keterampilan sosial (*social skills*) Dimensi kelima adalah *social skills*, artinya kemahiran dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki oleh orang lain. Diantaranya adalah kemampuan persuasi, mendengar dengan terbuka dan memberi pesan yang jelas, kemampuan menyelesaikan pendapat, semangat leadership, kolaborasi dan kooperasi, serta *team building*.

Kelima komponen tersebut dikelompokkan ke dalam dua kecakapan, yaitu:

- a. Kecakapan pribadi, meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi.
- b. Kecakapan sosial, meliputi empati dan keterampilan sosial.

Tanpa adanya kematangan kecerdasan emosional yang dimiliki auditor sangat sulit bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan frustrasi, stress, dan menyelesaikan konflik yang sudah menjadi bagian atau resiko profesi sehingga akan berpengaruh terhadap hasil kinerja auditor. (Jurnal kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, 2009).

Dengan kata lain emosi yang tenang terkendali akan menghasilkan optimalisasi pada fungsi kerja (Ary Ginanjar, 2003:218).

#### **2.1.4 Kecerdasan Intelektual Auditor**

##### **2.1.4.1 Definisi Kecerdasan Intelektual**

Pada bagian awal abad ke-20, IQ pernah menjadi isu besar. kecerdasan intelektual atau rasional adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis (dalam Istianah, 2011:16). Kecerdasan intelektual intinya merupakan aktifitas otak. Dimana mampu bekerja mengukur kecepatan, mengukur hal-hal baru, menyimpan dan mengingat kembali informasi objektif serta berperan aktif dalam menghitung angka dll (Ary Ginanjar, 2003:60), atau lebih tepatnya diungkapkan oleh para pakar psikologis dengan "*What I Think*".

Kecerdasan intelektual merupakan interpretasi hasil tes inteligensi (kecerdasan) ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan

inteligensi seseorang (Azwar,2004:51).

Menurut Robins dan Judge (2008: 57) dalam Dwijayanti (2009) mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang di butuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan memecahkan masalah.

Alfred Binet dan Theodore Simon dalam Dwijayanti (2009) mendefinisikan inteligensi sebagai suatu kemampuan yang terdiri dari tiga komponen yaitu Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilakukan dan Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri.

Kecerdasan intelektual menurut Sternberg (2008) dalam Yani (2011) adalah sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berfikir menggunakan proses-proses metakognitif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Menurut Shapiro ( dalam Afria Lisda, 2009) kecerdasan intelektual yaitu :

"Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan yang diukur dengan tingkat wawasan , rasional dan kritis seseorang".

Menurut Elhamidi (2009) kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, jantung, tubuh, dan aktivasi manusia fungsional untuk berinteraksi dengan orang lain.

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan (Binet & Simon dalam Azwar, 2004:5), bertindak dengan tujuan tertentu , berpikir rasional, menghadapi lingkungan dengan efektif

(Wechler dalam Azwar, 2004:7), serta dalam mengorganisasi pola-pola tingkah laku seseorang sehingga dapat bertindak lebih efektif dan lebih tepat (Freeman dalam Fudyartanta 2004:12).

Menurut Robert L. Solso, Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin (2007) dalam Yani (2011) mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali (*recall*), dan menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun konkret dan hubungan antara objek dan ide, serta menerapkan pengetahuan secara tepat.

Pada umumnya tugasnya seorang auditor berhubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan, *judgment* (pertimbangan) serta keputusan yang diambil. Dalam melaksanakan tugasnya, kecerdasan intelektual auditor merupakan salah satu faktor psikologis yang mendukung dalam mempengaruhi kinerja seorang auditor. Kualitas kinerja seorang auditor dapat dilihat dari kualitas judgement dan keputusan yang diambil (menurut Edward et al, 1984 dalam Siti Asih Nadhiroh, 2010). Dalam prakteknya seorang auditor yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi cenderung lebih mudah untuk mempelajari kasus-kasus baru, mampu menyerap dengan cepat informasi-informasi yang diterima dengan mudah, semuanya dapat disimpan dan diolah, untuk pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan diolah dan diinformasikan kembali, dan lebih cepat tanggap terhadap penyelesaian masalah klien.

Kemampuan intelektual merupakan logika deduktif dan pemikiran abstrak, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dan sanggup menyelesaikan dilema

etis. *Intelligent Quotient* (IQ) dihitung berdasarkan perbandingan antara tingkat kemampuan mental (*mental age*) dengan tingkat usia (*chronological age*), merentang mulai dari kemampuan dengan kategori idiot sampai dengan genius (Syaodih, 2005 dalam Sudrajat, 2008).

Menurut Shapiro (dalam Afria Lisda, 2009) kecerdasan intelektual yaitu kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan yang diukur dengan tingkat wawasan seorang auditor yang ditunjukkan melalui keinginan untuk membaca jurnal auditing, keinginan untuk selalu memiliki informasi dan gagasan serta memiliki pemikiran yang kreatif. Rasional seorang auditor dapat diukur dari bisa menerima saran dari orang lain, mampu berpikir logis serta mampu mengakui kekurangannya. Seorang auditor juga harus memiliki sikap kritis agar cepat tanggap dalam penyelesaiannya masalah klien sikap ini ditunjukkan dengan memiliki jiwa yang suka tantangan, berpikir terbuka, suka memberi solusi terhadap penyelesaian masalah sehingga sanggup menyelesaikan masalah.

Seorang auditor yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi dianggap bisa menyerap perintah atasan atau lebih cepat memahami dan melakukan pekerjaannya sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Dalam jurnal pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja auditor (2009), menurut penelitian yang dilakukan Goleman menyebutkan pengaruh IQ terhadap kinerja atau keberhasilan seseorang hanyalah sebesar 20% saja (2000).

#### **2.1.4.2 Implementasi Kecerdasan Intelektual**

Dalam penelitian ini kecerdasan intelektual mahasiswa diukur dengan

indikator sebagai berikut: (Stenberg, 1981) dalam Dwijayanti (2009)

1. Kemampuan Memecahkan Masalah

Kemampuan memecahkan masalah yaitu mampu menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, mengambil keputusan tepat, menyelesaikan masalah secara optimal, menunjukkan fikiran jernih.

2. Intelegensi Verbal

Intelegensi verbal yaitu kosakata baik, membaca dengan penuh pemahaman, ingin tahu secara intelektual, menunjukkan keingintahuan.

3. Intelegensi Praktis

Intelegensi praktis yaitu tahu situasi, tahu cara mencapai tujuan, sadar terhadap dunia keliling, menunjukkan minat terhadap dunia luar.

## **2.1.5 Kemampuan Mendeteksi Kecurangan**

### **2.1.5.1 Kecurangan (*Fraud*)**

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan. Kecurangan adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindak kecurangan itu berupa pengambilan atau pencurian harta milik atau aset tersebut. Pelaku kecurangan dapat dari dalam atau luar organisasi dan dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Pelaku kecurangan dari dalam organisasi adalah orang yang dapat akses ke informasi dan akses ke aset organisasi. Bentuk kecurangan seperti itu dalam penulisan buku ini disebut *fraud*. *Fraud* sulit terdeteksi karena pada hakekatnya *fraud* tersembunyi dan pelakunya

pada umumnya cerdas, pekerja keras, dan mempunyai profil seperti orang jujur serta sedikit catatan kriminalnya.

Untuk mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi fraud harus meningkatkan pemahaman dan mempelajari terlebih dahulu tentang teori dan pengertian fraud antara lain jenis, bentuk faktor-faktor pendorong dan penyebab fraud. Untuk mencegah fraud, perlu dilakukan eliminasi penyebab dan pendorong fraud serta pengendalian internalnya. Sedangkan pendeteksian fraud dilakukan dengan mengidentifikasi gejala dan tanda-tanda fraud untuk kemudian ditelaah dan dianalisa.

Kecurangan (*fraud*) perlu dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Perbedaan antara kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) terdapat pada tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kekeliruan dapat dideskripsikan sebagai “*unintentional mistakes*” (kesalahan yang tidak disengaja). Kekeliruan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, dari terjadinya transaksi, pendokumentasian, pencatatan, pengikhtisaran hingga proses menghasilkan laporan keuangan. Kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja.

Menurut *The Institute of Internal Auditor* (IIA) suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat dalam Karyono (2013):

*“Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception”.*

Definisi yang dikemukakan *The Institute of Internal Auditor* (IIA) di atas dalam

terjemahan bahwa kecurangan yaitu:

“Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja”.

Menurut G.Jack Balogna dan Robert Lindquist dalam *Fraud Auditing and Accounting Forensic* dalam Karyono (2013):

*“Fraud in nutshell, is intentional deception, commonly described as lying, cheating and stealing. Fraud can be perpetrated against customers, creditors, investor, supplier, bankers, insurers and government authorities”.*

Definisi yang dikemukakan G.Jack Balogna dan Robert Lindquist di atas dalam terjemahan bahwa kecurangan yaitu:

“Kecurangan adalah penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Fraud dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, banker, investor, penjamin asuransi dan pemerintah”.

Sedangkan kecurangan sebagaimana yang didefinisikan oleh AICPA (AU 316) dalam Karyono (2013) adalah:

*“Fraud is an intentional act that results in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit”.*

Definisi yang dikemukakan AICPA di atas dalam terjemahan bahwa kecurangan yaitu:

“Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan ini adalah subjek utama dalam audit”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dikutip oleh

Theodorus. M. Tuanakota (2010:194) menyebutkan pasal-pasal yang mencakup pengertian fraud diantaranya:

“Pasal 362 Pencurian : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Pasal 368 pemerasan dan pengancaman : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat maupun menghapuskan piutang.

Pasal 372 penggelapan : Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 387 Perbuatan curang : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk, menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutang”.

Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikatakan tindakan kecurangan (*fraud*). Dan salah satu kesulitan terbesar bagi auditor dalam mengungkap *fraud* adalah bagaimana cara

mengevaluasi dan menilai apakah salah saji material yang terjadi dilakukan dengan dasar kesengajaan atau tidak.

Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal umumnya terkait antara lain dengan kondisi entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum, maupun pertimbangan hukum dan perundang-undangan.

Meskipun kecurangan atau *fraud* merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor (independen) berkaitan secara khusus terhadap tindakan *fraud* yang berakibat terhadap salah saji material di dalam laporan keuangan.

Selain itu, pada umumnya juga *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersamaan, yaitu Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*, Peluang untuk melakukan *fraud* dan Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan *fraud*. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan atau dikatakan sebagai segitiga *fraud*.

Auditor adalah pihak yang wajib mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan, tak terkecuali auditor pemerintah. Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007) yang merupakan peraturan bagi auditor pemerintah Indonesia, dinyatakan bahwa pemeriksa bertanggung jawab untuk

mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna hasil pemeriksaan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka auditor pemerintah wajib untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi pada entitas yang di auditnya.

#### **2.1.5.2 Batasan/Aksioma Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) (Karyono:2013) dalam manual edisi ketiga, aksioma fraud adalah:

1. Tersembunyi

Kecurangan ini dilakukan secara tersembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya.

2. Bukti sebalik

Untuk membuktikan bahwa kecurangan tersebut terjadi, harus diusahakan bahwa kecurangan tersebut tidak terjadi, demikian pula sebaliknya.

3. Jenis – jenis *fraud* terdiri dari *intern fraud* dan *system control fraud*:

a. *Intern fraud* terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan fraud.

b. *system control fraud* terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja.

### 2.1.5.3 Faktor Penyebab atau Pendorong Terjadinya *Fraud*

William C Boyton dalam (Alvin A. Arens 2008:432) Tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316). *Fraud Triangle* (Segitiga Fraud) ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:



**Gambar 2.1**  
***Fraud Triangle***

#### 1. Tekanan (*Pressure*)

*Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

#### 2. Kesempatan (*Opportunity*)

*Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena pengendalian internal (*internal control*) suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang.

Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Menurut Steve Alberecht dalam Karyono (2013) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud yaitu kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan, terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan dan tidak sesuai kemampuan pegawai serta kurangnya jejak audit.

### 3. *Rationalization*

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

- 1) Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- 2) Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- 3) Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Teori yang dikemukakan oleh Jack Balogna terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan yang dikenal teori *GONE (Gone Theory)*, yaitu :

- a. *Greed* (Keserakahan) berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
- b. *Opportunity* (Kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi,

masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

- c. *Need* (Kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
- d. *Ekposure* (Pengungkapan) berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

Pengungkapan suatu tindak kecurangan tidak menjamin tidak terulangnya tindak kecurangan tersebut, baik pelaku yang sama maupun pelaku yang lain.

*Greed* dan *Need* ialah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor individu). *Opportunity* dan *Ekposure* ialah faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (faktor generik).

#### **2.1.5.4 Klasifikasi Kecurangan**

Kecurangan dapat juga diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (*intern*), dari luar organisasi (*ekstern*), dan melibatkan orang dalam dan luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.

- 1) Management *Fraud* (*Fraud* oleh Manajemen).

Management *fraud* umumnya sulit untuk ditemukan sebab seseorang atau lebih anggota manajemen bisa saja mengesampingkan *internal controls*.

Bentuk-bentuk management fraud antara lain ialah menghapuskan transaksi tertentu, kecurangan dalam mencantumkan atau melaporkan jumlah tertentu, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang termasuk di dalam kecurangan oleh pihak manajemen (*management fraud*), yaitu:

- a. Manajemen meminta agar KAP memberikan opini setuju (*unqualified opinion*) padahal manajemen tahu sebetulnya Laporan Keuangannya tidak layak.
- b. Manajemen melakukan transaksi-transaksi dengan pihak yang masih ada hubungan kekeluargaan atau persahabatan (*related party transaction*), atau juga melakukan transaksi yang tidak wajar (*notatarm's lenght*), kesemuanya itu merugikan perusahaan dan menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

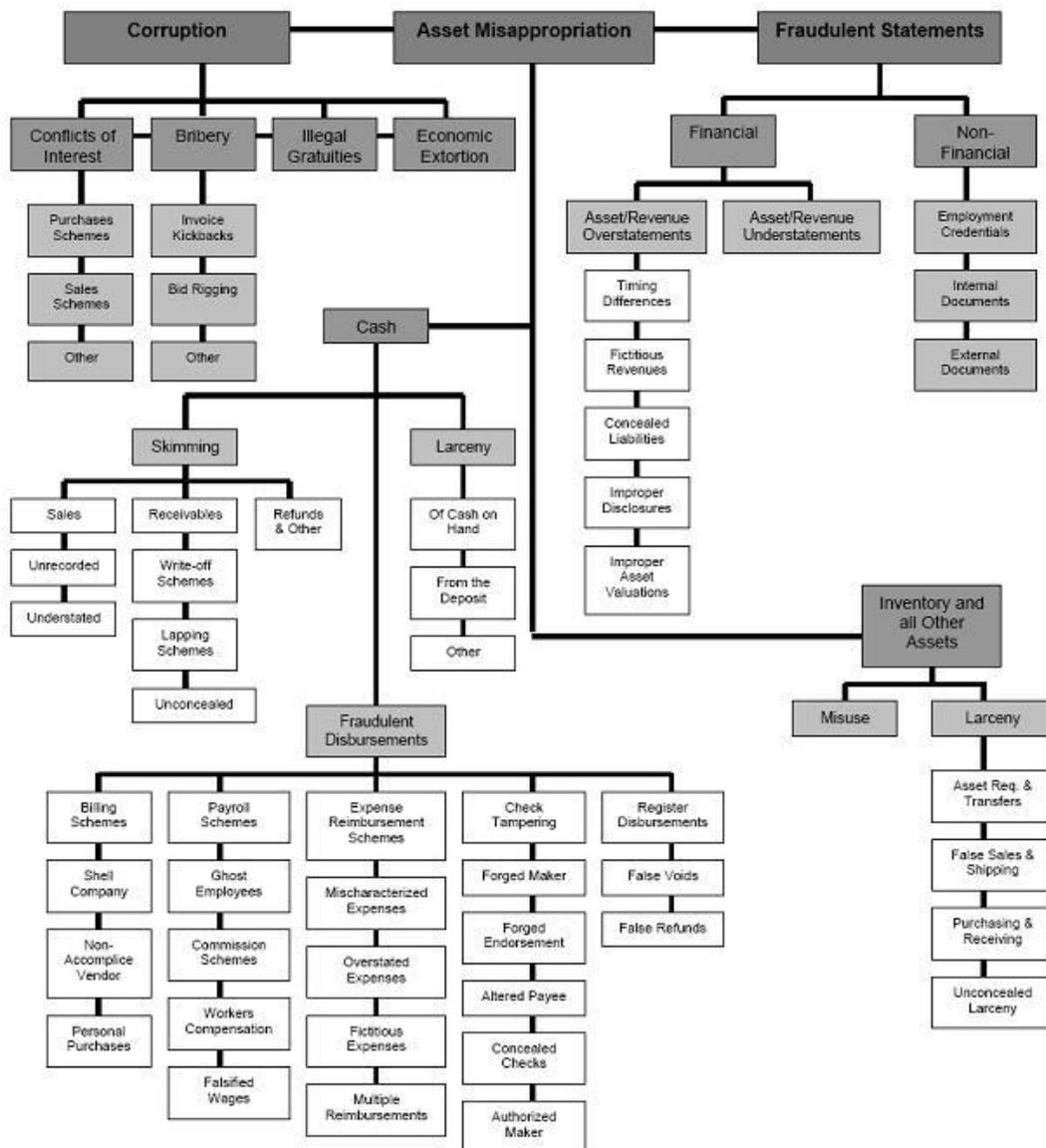
2) *Employee Fraud (Fraud oleh Karyawan)*.

Jika auditor bertanggung jawab menemukan semua *employee fraud*, maka audit tests harus diperluas sebab banyak sekali jenis-jenis kecurangan karyawan yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terdeteksi. Maka, prosedur auditnya akan lebih mahal dibanding dengan temuannya ini dikarenakan adanya tindakan kolusi antara beberapa karyawan dalam memalsukan dokumen dan akan sulit sekali ditemukan dengan cara audit yang biasa.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan,

mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*), dengan bagan sebagai berikut:

*Uniform Occupational Fraud Classification System*



Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2009:4)

**Gambar 2.2**  
***Fraud Tree***

### 3) Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)

Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, levensir dan oleh kontraktor, dengan cara:

- a. Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
- b. Penyerahan pekerjaan dengan kualitas yang rendah.
- c. Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.

Kecurangan (*Fraud*) ditinjau dari sisi akibat hukum yang ditimbulkan merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu kasus pidana umum, pidana khusus dan kasus perdata. Kasus perdata karena ada pelanggaran perikatan dan adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, di pemerintah akibat hukum perbuatan curang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan.

Selain itu, pengklasifikasian *fraud* (kecurangan) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

- a) Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-thebooks*, lebih mudah untuk ditemukan);

- b) Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: kickback (*fraud hidden on the books*);
- c) Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (*fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).

b. Berdasarkan frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

- a) Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).
- b) Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja.

c. Berdasarkan konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada

umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan, sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

d. Berdasarkan keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu.
- b) Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum.

#### **2.1.5.5 Bentuk-Bentuk Kecurangan (Fraud)**

Menurut Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner, fraud* (kecurangan) dalam Karyono (2013) terdiri dari beberapa tipe audit:

1. *Fraudulent Financial Reporting* (Laporan Keuangan yang curang).

Pelaporan keuangan yang curang adalah pernyataan kesalahan atau kesalahan dari jumlah atau penyingkapan dengan tujuan untuk menipu para pemakai. *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan

keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

2. *Misappropriation of Asset* (Penggelapan Harta).

Penggelapan harta adalah penipuan yang melibatkan pencurian dari suatu kesatuan asset. *Misappropriation of Asset* digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan para karyawan dan anggota internal dari organisasi. Penggelapan asset biasanya dilakukan di tingkat yang lebih rendah dari hirarki organisasi. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

3. Korupsi

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisma*). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer

Kecurangan yang berkaitan dengan komputer (*computer fraud*) menurut

Stanford Research Internasional yang diungkap oleh G. Jack Balogna dalam bukunya *Forensic Accounting* diungkap mulai tahun 1958, kejahatan waktu dikelompokkan dalam perusakan computer, pencurian informasi dan harta kekayaan, kecurangan keuangan atau pencurian kas dan penggunaan atau penjualan jasa computer secara tidak sah.

Terjadi perkembangan kejahatan di bidang computer dan contoh tindak kejahatan yang dilakukan sekarang antara lain menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan data palsu, salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja, merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening dalam jumlah kecil serta kejahatan kecurangan lainnya yang masih banyak terjadi.

#### **2.1.5.6 Aktivitas memerangi *Fraud***

Setiap pimpinan unit organisasi baik organisasi privat maupun publik harus aktif melawan atau memerangi *fraud* . Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination*, ada 4 aktivitas dalam memerangi fraud yaitu:

1. Pencegahan fraud (*fraud prevention*)
2. Pendeteksian fraud secara dini(*early fraud detection*)
3. Audit investigasi(*audit investigation*)
4. Tindak lanjut ke tindakan hukum (*follow-up legal action*)

Pencegahan dan pendeteksian merupakan aktivitas memerangi *fraud* yang biayanya paling murah karena:

- a. Semakin lama *fraud* tidak terungkap akan memberi peluang bagi pelaku

untuk menutupi perbuatannya

- b. Bila terjadi *fraud*, terjadi kerugian keuangan yang cukup besar dan pengembalian uangnya akan mengalami kesulitan
- c. Proses litigasi atau tindakan hukum akan memakan waktu lama

Pelaku tindakan *fraud* mempunyai kewenangan sebagai pengambil keputusan, mendapatkan akses ke informasi dan dapat akses ke aset. Pelaku *fraud* dapat dilakukan oleh manajer, karyawan, vendor, penanaman modal dan pelanggan. Pelaku individu didorong oleh moral, motivasi, tekanan, kesempatan, dan potensi.

#### **2.1.5.7 Kemampuan Mendeteksi**

Fraud dapat dideteksi bukan hanya melalui proses audit oleh akuntan publik saja tetapi secara lebih komprehensif melalui *fraud deterrence cycle* yang melibatkan manajemen, internal auditor, auditor eksternal dan auditor forensik. Analisis atas *corporate reporting value chain* mendukung pandangan bahwa auditor hanyalah salah satu bagian dalam mata rantai pelaporan perusahaan (termasuk pelaporan keuangan) dan pencegahan dan pendeteksian *fraud* akan membutuhkan kerja sama dari para partisipan atau bagian-bagian lain dari mata rantai ini.

Pihak-pihak yang ikut menanggung beban dalam mendeteksi adanya kecurangan ini mencakup, manajemen, dewan direksi, penyusun standar, dan regulator, yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam penegakan *corporate governance* dan masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri dalam

memastikan bahwa pasar finansial investor dan pemakai laporan keuangan lainnya terpenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain pihak-pihak tersebut bersama pihak lainnya merupakan *corporate reporting supply chain*.

Berdasarkan konsep tersebut, auditor hanyalah salah satu bagian saja yang terkait dalam mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan relevan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Komite audit harus tanggap dan bersikap transparan terhadap kepada auditor terutama untuk hal-hal yang bersifat rentan terhadap *fraud*.

Dengan transparansi dan komunikasi yang efektif dengan pihak auditor beban yang mereka tanggung, termasuk beban risiko terjadinya *fraud*, terasa berkurang. *Corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan, akan membawa dampak yang positif terhadap pengurangan risiko terjadinya *fraud*. Dalam penerapannya (*corporate governance*) harus dibarengi dengan suatu sistem manajemen yang efektif dan mengandung pengendalian internal yang dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan perkataan lain *corporate governance* yang dapat mengurangi terjadinya *fraud*, diterapkan jika melibatkan berbagai pihak, baik manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan perusahaan tersebut. Pencegahan dan pendeteksian *fraud* melalui penerapan *corporate governance* mungkin sulit, namun akan lebih sulit jika tidak mencoba untuk berubah dan menjadi lebih baik.

Pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah

dilaksanakan oleh auditor. Terjadinya kecurangan atau *fraud* sebenarnya berbeda dengan kekeliruan. Kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian (*concealment*). Penyembunyian tersebut terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Jika auditor meminta bukti transaksi yang mengandung kecurangan, pelaku kecurangan akan memberi informasi palsu atau informasi yang tidak lengkap. (Karyono, 2013).

Hasil penelitian Jamal et al. (1995) menunjukkan bahwa sebagian besar auditor (dalam penelitian ini menggunakan partner) tidak mampu mendeteksi kecurangan atau *fraud* dengan baik. Walaupun motivasi, pelatihan dan pengalamannya memadai, para partner yang diuji dapat dikelabui oleh framedari manajemen klien. Ketidakmampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan atau *fraud* ini ada hubungannya dengan keahlian yang dibentuk oleh pengalaman yang relevan dengan kecurangan. Kecurangan atau *fraud* itu sendiri frekuensi terjadinya jarang dan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya kecurangan, sehingga pengalaman auditor yang berkaitan dengan kecurangan atau *fraud* tidak banyak. Kemampuan auditor berkaitan erat dengan mendeteksi kecurangan, keterampilan umum dan khusus sangat dibutuhkan dalam mendeteksi *fraud*. Dalam melakukan audit, auditor harus menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait termasuk penghakiman. Auditor membuat penilaian di mengevaluasi pengendalian internal, mengukur risiko audit, merancang dan menerapkan sampel, menilai dan melaporkan aspek

ketidakpastian. Burnaby et al. (2011) menyatakan bahwa auditor dituntut untuk memiliki banyak pengalaman praktis dalam audit terutama dalam mengumpulkan dan menilai bukti audit.

Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Koroy (2008) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi.

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya.

Libby (1995) dalam Koroy (2005) menyatakan bahwa pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (*expertise*). Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam mengungkap tindakan kecurangan (*fraud*) yang kerap terjadi dalam suatu perusahaan.

Penelitian Sularso dan Na'im (1999) tentang analisis pengaruh pengalaman akuntan pada pengetahuan dan penggunaan intuisi dalam mendeteksi kekeliruan didapat hasil akuntan pemeriksa berpengalaman memiliki ketelitian yang lebih tinggi mengenai kekeliruan, dan akuntan pemeriksa berpengalaman menggunakan intuisi lebih banyak dibandingkan dengan akuntan pemeriksa yang tidak berpengalaman.

Penelitian yang sama tentang pengalaman auditor juga dilakukan oleh Noviyani dan Bandi (2002). Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan. Hal senada juga ditemukan pada penelitian Bulchia (2008) yang menemukan bahwa auditor yang memiliki pengalaman cenderung lebih dapat mendeteksi kecurangan dibanding dengan auditor yang memiliki kurang pengalaman.

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya. Melalui program pelatihan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemui (Noviyani dan Bandi, 2002). Lebih jauh, Noviyani dan Bandi (2002) juga mendapatkan hasil bahwa pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian auditor pada departemen tempat kekeliruan terjadi.

Faktor penyebab pendeteksian menjadi sulit tersebut adalah Karakteristik terjadinya kecurangan, Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit dan Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (*mistatement*) yang material dan juga

memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Salah satu itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Faktor pengalaman memegang peranan yang penting agar auditor dapat mendeteksi adanya tindak kecurangan, karena pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih (Christ, 1993 dalam Noviyani dan Bandi, 2002).

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya.

Seorang auditor yang tidak skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah satu yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah satu yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya.

Fullerton dan Durtschi (2004) menemukan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang rendah, dan hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya fraud karena informasi tambahan yang mereka miliki tersebut.

Bagaimanapun, kegiatan audit bukan ditujukan untuk menentukan adanya kesengajaan atau tidak, kewajiban auditor yang paling utama adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan bukti yang cukup dan memadai untuk kemudian dapat menilai apakah laporan keuangan audit bebas dari salah saji material atau tidak tanpa peduli salah saji material tersebut disengaja atau tidak.

Auditor adalah seseorang yang memiliki kepercayaan publik, oleh karena itu, auditor harus memiliki kemampuan yang akan digunakannya dalam melaksanakan tugas audit. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki auditor adalah kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang dapat saja terjadi dalam tugas auditnya.

#### **2.1.5.7.1 Kemampuan Mendeteksi *Fraud* Dengan Identifikasi Bendera Merah**

Tindak *fraud* (kecurangan) selalu disertai gejala dan tanda-tanda terjadinya yang disebut *red flags*, meskipun tidak semua gejala dan tanda-tanda yang ada pasti ada tindakan *fraud*. *Red flags* merupakan tanda-tanda kecurangan (*fraud*) yang tercemin melalui karakteristik tertentu yang bersifat kondisi atau situasi tertentu yang merupakan peringatan dini terjadinya *fraud*.

Dalam penelitian ini kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, sinyal, atau *red flags* suatu tindakan yang diduga

menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Secara garis besar, tanda-tanda yang digunakan untuk mengindikasikan kecurangan dibagi menjadi dua yaitu tanda-tanda kecurangan yang berasal dari dalam dan luar perusahaan (Fonorow, 1989 dalam Setiawan, 2003). Tanda-tanda yang berasal dari dalam perusahaan meliputi penyimpangan pemakaian produksi yang ditunjukkan oleh beberapa laporan produksi yang telah diubah, perubahan catatan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, penghilangan catatan-catatan yang dapat membuktikan terjadinya manipulasi, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda kecurangan yang berasal dari luar perusahaan meliputi kelebihan pembebanan jasa dan bahan, tagihan yang salah dikirimkan ke perusahaan yang salah akibat pemalsuan faktur, kekurangan bukti pendukung untuk suatu pembayaran barang dan jasa, dan lain-lain.

Selain dengan melihat tanda atau sinyal terjadinya kecurangan, petunjuk kecurangan lainnya yaitu dengan melihat ada tidaknya *red flags*. *Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut (Sitinjak, 2008). Meskipun timbulnya *red flags* tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun *red flags* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi (Amrizal, 2004). Pemahaman dan analisis lebih lanjut mengenai *red flags*, dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Setelah mengetahui

cara untuk mendeteksi kecurangan, seorang auditor, khususnya auditor pemerintah wajib untuk memperhatikan sikap-sikapnya sesuai dengan standar profesinya karena jika tidak diikuti oleh sikap dari auditor itu sendiri, cara tersebut akan menjadi sia-sia. Auditor dapat gagal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi atau bahkan setelah mengetahui adanya kecurangan tersebut, auditor ikut terlibat dalam menyembunyikan kecurangan tersebut. Sikap minimal yang harus dipertahankan auditor sesuai dengan standar umum profesinya, yaitu sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme (SPKN, 2007).

Kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut karena keahlian yang dimilikinya dapat menjadikannya lebih sensitif (peka) terhadap tindak kecurangan (Lastanti, 2005). Independensi diperlukan agar auditor bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan pada perusahaan yang di auditnya dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangan tersebut (Lastanti, 2005). Sedangkan profesionalisme diperlukan agar auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang di auditnya bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Melihat dan mendeteksi kecurangan dalam buku besar dan laporan keuangan lebih merupakan penetapan pikiran daripada metologi. Tidak ada buku resep yang sederhana untuk melakukan audit kecurangan atau daftar atau

wawancara yang terpola. Kecurangan adalah fenomena manusia. Kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan adalah Pengendalian intern tidak cukup-tidak ada, kelemahan, dan kecerobohan dalam melakukan pengendalian, Penyaringan calon pegawai tidak ketat, Lingkungan yang bermotivasi tidak cukup- kurangnya pengenalan dan imbalan yang lemah atau tidak cukup, Supervise yang buruk, Penekanan manajemen yang berlebihan untuk keuntungan jangka pendek, Manajemen yang korupsi, Industry yang korupsi dan bisnis yang gagal.

Setiap auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah punya tanggung jawab untuk mendeteksi *fraud*. Tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi *fraud* diatur dalam standar profesinya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik No. diatur tentang tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi kekeliruan (*error*), ketidakberesan (*irregularities*), dan pelanggaran hukum (*illegal act*).

Dalam standar tersebut, tidak ada jaminan penuh bahwa hasil auditor independen akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, tetapi diatur keharusan bagi auditor untuk menentukan risiko bahwa suatu kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum yang mungkin menyebabkan laporan keuangan berisi salah satu material. Oleh karena itu, auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksian kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum yang material telah dilakukan.

### 2.1.5.7.2 Kemampuan Mendeteksi fraud dengan identifikasi Gejala *Fraud*

Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination*, ada 6 jenis tanda-tanda fraud yaitu :

#### 1. Keganjilan Akuntansi

Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya. Keganjilan akuntansi tersebut antara lain ketidakberesan dokumen pendukung akuntansi dan kesalahan jurnal.

- a. Ketidakberesan dokumen, dapat merupakan gejala atau . Tanda terjadinya kecurangan karena adanya ketidakberesan pada pendukung akuntansi tersebut disengaja dibuat oleh pelaku untuk menghilangkan jejak kecurangan dengan cara menghilangkan, merusak, mengubah dokumen, membuat dokumen ganda atau membuat uraian dokumen pendukung aktivitas dimana pelaku melakukan kecurangan berupa pencurian atau pengambilan uang sebesar pengeluaran yang pernah terjadi.
- b. Kesalahan penjurnalan antara lain jurnal tanpa dokumen pendukung jurnal koreksi tanpa otoritas, jurnal yang tidak seimbang (*balance*), jurnal yang banyak dibuat pada akhir periode akuntansi, jurnal yang dibuat oleh petugas yang tidak biasa atau tidak mempunyai wewenang. Penjurnalan tersebut dapat merupakan gejala adanya kecurangan (*fraud*) karena sengaja dibuat untuk menutupi kecurangan. Contohnya dibuat ayat jurnal koreksi tanpa otoritas untuk mengoreksi akuntansi yang telah dibuat yang pada dasarnya didukung oleh bukti- bukti yang sah. Apabila ada ayat jurnal

koreksi tanpa otoritas dapat dicurigai dan dapat dipakai sebagai alat pendeteksian fraud.

## 2. Kelemahan Pengendalian Intern

Bila pengendalian intern tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*. Kelemahan pengendalian intern (*internal control weakness*) berupa tidak diterapkannya kunci pengendalian yaitu pemisahan fungsi, persetujuan transaksi yang layak, pendokumentasian dan pencatatan yang layak, pengendalian fisik terhadap aset, dan pencatatan serta pengecekan independen dalam pelaksanaan tugas.

### a. Kelemahan dalam pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksud adalah pemisahan tugas antara fungsi pencatatan, penyimpanan, dan otorisasi. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi saling kontrol (*check and recheck*) antara ketiga fungsi tersebut. Bila ada perangkapan fungsi terbuka peluang untuk dilakukan manipulasi atau kecurangan.

### b. Kelemahan dalam aktivitas persetujuan transaksi

Persetujuan transaksi yang layak menghendaki agar setiap dokumen yang dipersiapkan harus dikaji ulang dalam hal kebenaran dan dikaji ulang mengenai adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang. Otorisasi pejabat yang berwenang menunjukkan tanggung jawab atas transaksi dan untuk pembuktian atas keabsahannya. Bila dijumpai adanya ketidakjelasan dalam persetujuan transaksi, berarti ada gejala terjadinya kecurangan.

c. Kelemahan dalam pendokumentasian dan pencatatan

Dokumentasi dan pencatatan dimaksud bertujuan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan sebagai alat pembuktian. Oleh karena itu, setiap transaksi harus didokumentasikan dan dicatat segera setelah terjadi. Jika tidak, buka peluang untuk melakukan rekayasa sehingga pertanggungjawaban dan pembuktian transaksinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan demikian bila ditemui kelemahan pendokumentasian dan pencatatan terdeteksi adanya gejala kecurangan.

d. Kelemahan pengendalian fisik terhadap aset dan pencatatan

Pengendalian fisik terhadap aset organisasi adalah adanya pembatasan orang yang boleh mengakses aset organisasi seperti kas, barang persediaan, dan harta kekayaan lain termasuk keamanan fisiknya seperti lokasi dan tempat penyimpanannya serta pengawasan langsung atas fisiknya. Demikian pula keamanan terhadap pencatatan dan program komputernya. Kelemahan atas pengawasan fisik aset dan pencatatan akan berakibat terbukanya peluang untuk mencuri atau memanipulasi aset dan merekayasa catatan untuk menutupi tindak kecurangan.

e. Kelemahan pengecekan secara independen terhadap pelaksanaan tugas

Pengecekan oleh pihak independen atau pihak yang tidak terkait dengan aktivitas yang dicek bertujuan untuk memperoleh penilaian secara objektif terhadap kinerja suatu unit organisasi. Sumber utama yang digunakan untuk penilaian kinerja ialah informasi yang disajikan manajemen.

### 3. Penyimpangan Analisis

Memahami tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan melakukan berbagai analisis berupa:

- a. Analisis vertikal ialah analisis hubungan antara item-item dalam laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba dan laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam persentase.
- b. Analisis horizontal adalah analisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
- c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio lancar (*current ratio*).
- d. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.

Ditemukannya penyimpangan dari hasil analisis dapat dipergunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Hasil analisis perbandingan dua kegiatan yang berhubungan seharusnya menunjukkan hal yang sama atau bila ada perbedaan, perbedaannya yang tidak mencolok.

### 4. Gaya hidup berlebihan

Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Setelah *fraud* berhasil, gaya hidup berlaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian secara tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataan bahwa pelaku ternyata hidupnya sangat boros dan sangat konsumtif suka membeli barang mewah dan

mobil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya *fraud* yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.

#### 5. Kelakuan Tidak Biasa

Kelakuan tidak biasa (*unusual behaviour*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasa takut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*. Perilaku menyimpang tersebut antara lain gelisah tidak dapat santai karena selalu dihantui rasa bersalah, tidak mampu menatap muka lawan bicara karena takut, bila diajak bicara soal *fraud* bicaranya defensif atau beragumen untuk mencari pembenaran atau alasan.

#### 6. Pengaduan

Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadu mungkin untuk memperoleh keuntungan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadu karena iri hati atau masalah pribadi lain.

Deteksi fraud harus dilakukan sedini mungkin agar potensi terjadinya dapat segera dicegah dan fraud yang telah terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Para atasan langsung, pimpinan organisasi, auditor intern dan *fraud examiner* harus cepat tanggap setiap menemukan gejala fraud. Gejala fraud yang ditemui harus segera ditelaah lebih lanjut, diuji, dan dianalisis. Bila indikasi fraud cukup kuat, ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi terhadap gejala tersebut.

### 2.1.5.7.3 Standar Pengauditan Mengenai Pendeteksian Kecurangan

Dalam pendeteksian kecurangan yang menjadi masalah bukanlah ketiadaan standar pengauditan yang memberikan pedoman bagi upaya pendeteksian kecurangan, tetapi kurang memadainya standar tersebut memberikan arah yang tepat. Hal ini terlihat dari uraian perkembangan standar pengauditan di depan yang menunjukkan usaha untuk terus-menerus memperbaiki standar yang mengatur pendeteksian kecurangan. Perbaikan ini terutama timbul dari kenyataan bahwa tanggung jawab pendeteksian kecurangan pada praktek belum cukup efektif dilaksanakan.

Keluarnya SAS No. 53 menjawab tantangan kesenjangan harapan dengan secara signifikan meningkatkan tanggung jawab auditor berkaitan dengan kecurangan. Dalam standar ini ditegaskan Persyaratan yang baru dalam SAS No. 99 ini adalah meminta tim audit agar berdiskusi selama tahap perencanaan mengenai potensi salah saji material karena kecurangan. Diskusi ini dilakukan dengan cara *brainstorming* yang diharapkan mencapai dua tujuan. Pertama, bersifat strategik yaitu agar tim penugasan mendapat pemahaman yang lebih baik atas informasi yang dipunyai dari anggota tim yang berpengalaman tentang pengalaman mereka dengan klien dan bagaimana kecurangan mungkin terjadi dan disembunyikan. Tujuan kedua adalah menetapkan "*tone at the top*" yang sepantasnya dalam melaksanakan penugasan audit. Cara ini adalah usaha untuk memodelkan derajat skeptisisme profesional yang tepat dan menetapkan budaya atas penugasan. Budaya ini dipercaya akan merasuk dalam ke seluruh penugasan sehingga membuat semua prosedur audit lebih efektif (Ramos 2003).

Auditor menurut standar baru ini perlu memperluas lingkup informasi yang mereka gunakan untuk menilai risiko salah saji material karena kecurangan, diluar faktor-faktor risiko kecurangan yang terdapat pada SAS No. 82. Faktor-faktor risiko kecurangan itu adalah “kejadian-kejadian atau kondisi yang mengindikasikan insentif/tekanan untuk mendorong kecurangan, kesempatan untuk melaksanakan kecurangan, atau sikap/rasionalisasi untuk membenarkan atau menjustifikasikan tindakan-tindakan kecurangan”. Walaupun faktor-faktor risiko kecurangan tidak harus mengindikasikan kecurangan ada, tetapi faktor-faktor itu sering ada bila bila kecurangan terjadi, sehingga menjadi elemen penting yang dipertimbangkan dalam ruang lingkup perikatan audit.

Selanjutnya auditor diminta untuk mempertimbangkan program dan pengendalian oleh manajemen berkenaan dengan risiko dan menentukan apakah program dan pengendalian itu memperbaiki atau memperburuk risiko yang teridentifikasi. Auditor juga dipersyaratkan agar membangun tanggapan yang tepat atas tiap risiko yang teridentifikasi. Prosedur yang direncanakan harus mempertimbangkan risiko manajemen mengesampingkan pengendalian. Prosedur itu juga mencakup pengujian ayat jurnal dan penyesuaian lain, mereview estimasi akuntansi atas bias yang terjadi dan mengevaluasi penjelasan bisnis atas transaksi material yang tidak biasa.

Banyak hal-hal baru dalam standar ini dan membawa harapan bagi perbaikan. Carpenter (2007) dalam upaya menguji efektivitas dari salah satu aspek dari SAS No. 99 yaitu penggunaan sesi brainstorming mendapatkan bahwa brainstorming amat berguna dalam melakukan pertimbangan mengenai

kemungkinan kecurangan. Hasil dari eksperimen yang dilakukan Carpenter menyarankan meskipun jumlah dari ide-ide yang dihasilkan berkurang, tim audit yang mengadakan *brainstorming* menghasilkan ide-ide kecurangan yang berkualitas lebih banyak daripada auditor secara individual menghasilkan ide-ide tersebut sebelum sesi *brainstorming*. Tim audit menghasilkan ide-ide kecurangan berkualitas baru selama sesi *brainstorming*. Hasil-hasil ini juga menunjukkan penilaian risiko kecurangan yang dihasilkan setelah sesi *brainstorming* secara signifikan lebih tinggi dari penilaian yang dilakukan auditor secara individual sebelum sesi *brainstorming*, khususnya bila kecurangan itu memang ada. Hasil ini menunjukkan sesi *brainstorming* cenderung meningkatkan kemampuan auditor mengidentifikasi kecurangan. Harapan perbaikan dengan berlakunya SAS No. 99 ini amat diharapkan seiring dengan diterapkannya cara-cara baru oleh para auditor dalam penugasan.

#### **2.1.5.8 Teknik Mendeteksi fraud**

Menurut Sudarwan DR dalam Audit Kecurangan (*Fraud Auditing*) dalam buku Karyono (2013:109), Teknik mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu teknik *Critical Point Auditing* (CPA) dan *Job Sensitivity Analysis*. Pada teknik *critical point auditing*, deteksi *fraud* dilakukan dengan analisis trend dan pengujian khusus, sedangkan pada teknik *job sensitivity analysis* (analisis kepekaan), deteksi *fraud* dilakukan dengan mengidentifikasi posisi pekerjaan yang rawan kecurangan dan dengan mempertimbangkan analisis.

#### **2.1.5.8.1 Mendeteksi Fraud Dengan *Critical Point Auditing* (CPA)**

Setiap perusahaan pasti memiliki titik rawan yang sering digunakan sebagai tempat terjadinya kecurangan. Apabila kecurangan terjadi pada titik tersebut, akan dengan mudah diketahui. Namun, dalam banyak hal keberhasilan suatu kecurangan lebih banyak disebabkan kepandaian pelaku dalam menyembunyikan kegiatannya diantara transaksi-transaksi yang ada. CPA merupakan suatu teknik dimana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Hasilnya berupa gejala atau kemungkinan terjadinya kecurangan yang pada gilirannya mengarah kepada penyelidikan yang lebih rinci. Metode ini dapat digunakan pada setiap perusahaan. Semakin akurat dan komprehensif suatu catatan, maka semakin efektif teknik ini dalam mengetahui gejala kecurangan. *Critical Point Auditing* ini adalah :

##### **1. Mendeteksi *Fraud* Dengan Analisis Tren**

Pengujian ini terutama dilakukan atas kewajaran pembukuan pada rekening buku besar dan menyangkut pula pembandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya maupun dengan sejenis dari cabang-cabang perusahaan. Data-data yang digunakan biasanya berupa : Rekening Buku Besar, Neraca, dan Anggaran. Pembandingan dengan periode sebelumnya dapat diarahkan untuk :

- a. mendapatkan gejala manipulasi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang melakukan kecurangan.
- b. mendeteksi kemungkinan adanya kerugian kecurangan.

Dampak atas kecurangan yang didasarkan atas analisis rasio dan kinerja

adalah hal yang penting untuk diamati lebih lanjut. Seorang pelaku kecurangan tidak dapat menjamin bahwa tindakannya dapat dilakukan terus menerus secara teratur. Pelaku tersebut mungkin cukup agresif, namun jika pengawasan ditingkatkan atau jika prosedur ataupun pengendalian yang efektif diterapkan, kecurangan akan dapat dideteksi. Para pelaku kecurangan tersebut membutuhkan waktu dan usaha untuk menciptakan kesempatan yang baru. Dengan adanya ketidakteraturan dalam kesempatan untuk melakukan kecurangan, maka memberi dampak terhadap ketidakkonsistenan pelaku kecurangan dalam melakukan kecurangan tersebut akan nampak dalam pembukuan perusahaan.

## 2. Mendeteksi *Fraud* Dengan Pengujian Khusus

Pengujian khusus dilakukan terhadap kegiatan- kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti:

- a. Kecurangan pembelian umumnya dilakukan dengan cara meninggikan nilai yang terdapat dalam faktur. Dalam setiap kecurangan pembelian, hampir selalu terdapat pengkreditan yang salah pada rekening kreditur. Cara lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pembelian fiktif. Hutang yang timbul kemudian dilunasi oleh perusahaan, bukan kepada pemasok, namun kepada pelaku kecurangan. Walaupun rekening dapat dibukukan, namun pelaku kecurangan tidak mampu menyiapkan bukti pendukung yang lengkap. Oleh karena itu, pengujian pertama yang sangat penting adalah untuk meyakinkan keabsahan pemasok.
- b. Aktivitas Pelayanan masyarakat berupa pungutan liar, pelayanan yang diskriminatif, tidak ada ketepatan waktu dan terjadi praktik-praktik

penyuapan dalam pelayanan masyarakat.

- c. Transaksi yang mempunyai hubungan istimewa atau benturan kepentingan.
- d. Aktivitas penjualan berupa kecurangan *lapping*, penjualan yang tidak dilaporkan seluruhnya atau dilaporkan sebagian saja dan penjualan fiktif.
- e. Pejabat baru yang memilih rekanan baru atau membawa rekanan baru untuk mengganti rekanan lama.

Mengingat aktifitas tersebut berisiko tinggi untuk terjadinya kecurangan (*fraud*) maka pendeteksiannya harus dilakukan lebih intensif. Petugas yang melakukan pendeteksian fraud dengan pengujian khusus ini harus memiliki pengetahuan di bidang aktivitas dimaksud dan paham terhadap titik-titik kritis pada proses kegiatan yang diuji.

Diuji pula bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur pada proses aktiitasnya apakah ada upaya menutupi atau menyembunyikan perbuatan fraud dengan merekayasa pelaksanaan sistem dan prosedur pada aktiitas tersebut.

#### **2.1.5.8.2 Mendeteksi Fraud Dengan *Job Sensitivity Analysis* (JSA)**

Setiap pekerjaan dalam suatu perusahaan memiliki berbagai peluang/kesempatan untuk terjadinya kecurangan. Hal ini tergantung dari beberapa faktor seperti : akses, kemampuan, dan waktu yang tersedia untuk merencanakan dan Melaksanakannya. Teknik analisis kepekaan pekerjaan (*job sensitivity analysis*) ini didasarkan pada suatu asumsi, yakni bila seseorang/sekelompok karyawan bekerja pada posisi tertentu, peluang/tindakan

*negative* (kecurangan) apa saja yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, teknik ini merupakan analisis dengan risiko kecurangan dari sudut “pelaku potensial”, sehingga penegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pengendalian intern pada posisi-posisi yang rawan kecurangan.

#### 1. Pendeteksian *fraud* dengan metode pendekatan

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan di dalam perusahaan yang menjadi obyek pemeriksaan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diamati dan dipelajari adalah struktur organisasi, uraian tugas masing-masing pejabat yang ada dalam perusahaan, manual akuntansi dan formulir-formulir yang digunakan dan pendelegasian wewenang

Langkah berikutnya adalah menyiapkan analisis setiap pejabat. Simpulan yang diperoleh dari langkah ini harus dapat menunjukkan spesifikasi setiap pekerjaan dan mencatat perbedaan antara akses yang diperbolehkan dengan akses yang direncanakan. Sebagai contoh, petugas bagian pesanan penjualan tidak-tidak diperkenankan memiliki akses terhadap catatan pembelian. Namun kita juga harus mempertimbangkan kondisi nyata dari ruangan yang tersedia dalam perusahaan yang bersangkutan, artinya apabila ruangan petugas bagian penjualan bersama-sama dengan karyawan bagian pembelian, adalah suatu hal yang tidak realistis menganggap petugas penjualan tersebut tidak mungkin membaca, merubah, atau menyembunyikan catatan.

#### 2. Pendeteksian fraud dengan pengawasan rutin

Suatu hal yang mudah bagi pelaku kejahatan dalam suatu perusahaan untuk

beroperasi, bilamana manajer sibuk dengan tanggung jawab lain. Dalam melakukan pengendalian juga harus diperhatikan hal-hal seperti bawahan lebih pandai dari atasannya, atau bila atasan memiliki bawahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.

### 3. Pendeteksian fraud dengan mempertimbangkan karakter pribadi

Karakter pribadi karyawan harus dipertimbangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti :

#### a) Kekayaan yang tidak bisa dijelaskan

Dari hasil penelitian secara terbuka dan tertutup (secara diam-diam) diperoleh fakta bahwa seorang pegawai yang bertugas di salah satu unit organisasi yang rawan kecurangan ternyata memiliki kekayaan yang besar, tetapi tidak dapat dijelaskan perolehan atau asal usulnya. Sedangkan petugas tersebut adalah salah satu personel yang memegang posisi kunci dalam suatu aktivitas organisasi yang peluangnya cukup besar untuk melakukan tindak kecurangan. Kondisi ini merupakan tanda atau gejala yang menunjukkan petugas tersebut melakukan kecurangan (*fraud*).

#### b) Pola hidup mewah

Hasil deteksi fraud dengan teknik analisis kepekaan berupa penelitian karakter pegawai yang bertugas pada akhirnya organisasi yang risiko fraudnya tinggi, diperoleh kenyataan bahwa pola hidup pegawai yang diteliti ternyata sangat mewah dan tidak sesuai dengan pendapatan resmi yang diterimanya. Harus dilakukan penelitian lebih lanjut bahwa pola hidup mewah tersebut benar-benar tidak didukung oleh perolehan

penghasilan lain yang sah. Setelah diperoleh keyakinan yang memadai baru dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi itu merupakan tanda atau gejala adanya tindak kecurangan.

- c) Pegawai yang sering merasa kecewa/tidak puas atas keputusan manajemen/tidak naik-naik pangkat

Pendeteksian dengan teknik analisis kepekaan diperoleh temuan adanya pegawai yang tidak puas antara lain karena tidak naik pangkat atausebab lain. Ketidakpuasan pegawai tersebut harus diwaspadai terutama apabila yang bersangkutan memegang posisi kunci yang rawan *terjadinya fraud*. Oleh karenaitu, dalam melakukan deteksi kecurangan dengan teknik analisis kepekaan, masalah ini perlu mendapat perhatian.

- d) Sifat egois dari karyawan (mementingkan diri sendiri)

Karakteregois lebih berorientasi pada diri pribadi sehingga dalam mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda fraud perlu diwaspadai. Kewaspadaan itu perlu ditingkatkan apabila pegawai yang egois tersebut menjalankan tugas pada aktivitas organisasi yang risiko fraudnya cukup tinggi. Pelaku fraud cenderung lebih mementingkan diri pelaku meskipun tindakan fraud risikonya tinggi bagi diri pelaku.

- e) Karyawan yang sering mengabaikan instruksi/prosedur  
f) Karyawan yang merasa dianggap paling penting

#### 4. Tindak Lanjut Hasil Analisis

Hasil analisis akan memberikan gambaran tentang jenis pekerjaan mana yang mengandung risiko tinggi dan metode fraud yang bagaimana yang sebaiknya

diterapkan. Pengujian secara detail harus dilakukan guna menentukan apakah kesempatan yang ada telah digunakan. Selain itu, pengklasifikasian *fraud* (kecurangan) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

a. Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- a) Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-thebooks*, lebih mudah untuk ditemukan);
- b) Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the-books)*;
- c) Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-*write-off (fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).

b. Berdasarkan frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

- a) Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi

- disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).
- b) Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja.
  - c. Berdasarkan konspirasi Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan, sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.
  - d. Berdasarkan keunikan Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
    - a) Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu.
    - b) Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum.

#### **2.1.5.9 Tanggung Jawab Auditor Independen Untuk Mendeteksi Fraud**

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan mengharuskan auditor untuk memahami karakteristik dan kerumitan yang terkait

dengan berbagai karakteristik tersebut, kemudian dirancang prosedur audit yang cocok dan hasilnya dievaluasi.

Karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dimaksud adalah pertama masalah dampaknya secara individual atau secara keseluruhan apakah cukup penting sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Siapa yang terlibat, apakah manajemen atau karyawan. Biasanya untuk menutupi kekeliruan atau ketidakberesan dilakukan dengan memanipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya. Penyebabnya apakah karena kelemahan rancangan struktur pengendalian atau kelemahan pelaksanaan pengendalian intern. Karakteristik terakhir adalah bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, auditor harus menerapkan pola kesaksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya. Di samping itu harus menerapkan derajat skeptisme profesional yang semestinya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan atau terdeteksi.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan. Dampak atau pengaruh adanya pelanggaran hukum terhadap keuangan dapat bersifat langsung dan tidak langsung, sedangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan bersifat tidak langsung. Jika pelanggaran hukumnya terjadi pada transaksi yang jauh terpisah dari laporan keuangan, semakin kecil auditor menyadari atau mengenal adanya pelanggaran hukum tersebut.

Jika ada indikasi adanya unsur pelanggaran hukum yang mungkin

menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan, auditor harus berkewajiban melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk menyakinkan adanya pelanggaran hukum tersebut.

Pelaksanaan audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing tidak menjamin bahwa pelanggaran hukum dapat terdeteksi, karena standar audit yang ditetapkan auditor independen tidak meliputi prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi fraud pada standar auditnya sangat minim. Hal ini berkaitan dengan *fairness doctrine* yang sejalan dengan pemberian opini terhadap laporan keuangan.

Dapatkah tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi kecurangan ditingkatkan? Sehubungan dengan hal tersebut Dr. Cormichael dan John J. Wilingham dalam Karyono (2013) di dalam bukunya "*Perspective Auditing*" berpendapat bahwa :

*“There are two basic issues underlying the question of appropriate extent of responsibilities for fraud detection. First how should some counts have interpretes the auditor's legal responsibilities detectes fraud more broadly than the responsibility detected by professional standard. Second should the auditor professional responsible to detect fraud or other illegalities inmaterial to thw financial statements ?”*

Definisi yang dikemukakan oleh Dr. Cormichael dan John J. Wilingham dalam Karyono (2013) di dalam bukunya "*Perspective Auditing*" di atas dalam terjemahan bahwa :

“Ada dua isu utama yang mempertanyakan dan perlu digaris bawahi untuk tanggung jawab audior dalam mendeteksi fraud. Pertama bagaimana tanggapan profesi pada kenyataan bahwa beberpa hak atau pengadilan

telah menginterpretasikan bahwa tanggung jawab auditor mendeteksi fraud lebih luas dari tanggung jawab menurut standar profesunya. Kedua dapatkah auditor mempertanggungjawabkan secara profesi untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap hukum lain yang tidak material pada laporan keuangan”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Dr. Cormichael dan John J. Wilingham bahwa pendapat hakim atau pengadilan mengenai "*Fairness Doctrine*" menyulitkan profesi auditor. Oleh karena itu, ada pendapat untuk pengembangan atau perbaikan standar audit atau standar profesi untuk mendeteksi *fraud*.

Sehubungan dengan hal tersebut dinyatakan bahwa pembentukan atau pengembangan standar profesi baru dapat mengurangi perbedaan antara standar pendeteksian *fraud* yang dibebankan hakim atau pengadilan dengan kewajiban profesi. Harapan baik ini bersandar pada sejarah dan pengalaman *fairness doctrine* dan standar profesi yang telah disiapkan. *Fairness doctrine* yang dipakai oleh hakim atau pengadilan telah memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi uang diterima umum tanpa menginformasikan informasi tambahan yang material dalam arti jika informasi tambahan tersebut tidak disajikan akan menyatukan pengambilan keputusan. Perbedaan ini bisa terjadi karena adanya argumentasi bahwa hal-hal yang telah ditetapkan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum menciptakan terjadinya penyajian yang menyesatkan. Hal ini memberi kesan bahwa tambahan hal-hal yang telah ditetapkan dalam prinsip akuntansi yang diterima umum dengan kepatuhan terhadap *fairness doctrine*.

Sehubungan dengan pendeteksian *fraud*, dalam pelaksanaan audit sesuai dengan standar profesi auditor independen harus memiliki kemampuan untuk mengenali indikasi-indikasi teknik penyimpangan dan memiliki pemahaman atas

perkembangan metode dalam teknik pendeteksian *fraud*. Di samping itu, auditor independen yang dalam pelaksanaan auditnya terjadi *fraud* harus memandang masalah bukti dan pembuktian dari segi hukum.

Untuk auditor pemerintah Indonesia dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SA-APIP) telah diatur tanggung jawab auditornya untuk mendeteksi *fraud* yaitu dalam standar pelaksanaan audit butir keempat yaitu :

“Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditor terhadap perundang-undangan dan melakukan pengujian atas kemungkinan adanya kekeliruan, ketidakwajaran, serta tindakan melawan hukum”.

#### **2.1.5.10 Implementasi Mendeteksi Kecurangan**

Langkah awal dari pendeteksian *fraud* ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini, sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi . Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang andal baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaan. Pengendalian intern bukan saja untuk mencegah *fraud*, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi *fraud* secara dini. Salah satu klasifikasi pengendalian intern adalah sebagai pengendalian detektif. Berbagai sarana kendali yang ada, dirancang untuk dapat mencegah *fraud* secara otomatis sehingga setiap tindak *fraud* dapat terdeteksi tanpa menunggu hasil audit. Dari hasil pemahaman

aktivitas organisasi tersebut dapat mengidentifikasi *fraud* yang terjadi pada aktivitas itu.

Langkah untuk mendeteksi *fraud* selanjutnya adalah dengan memahami tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud*. Tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud* berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dalam pengendalian intern. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus dianalisis dan dievaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.

Pendeteksian fraud terhadap gejala dan tanda-tanda *fraud* dapat pula dilakukan terhadap kondisi atau situasi tertentu yang disebut bendera merah (*red flags*) yaitu suatu kondisi yang memberi isyarat dini terjadinya *fraud* (*fraud warning signs*).

Seperti halnya pada gejala, tidak semua bendera merah dipastikan terjadi fraud, tetapi setiap *fraud* selalu tampak adanya kondisi yang memberi isyarat adanya fraud baik dari pelaku, organisasi, maupun jenis fraudnya.

Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*).

*Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian fraud melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan *fraud* dan apa saja yang dapat dilakukan.

Menurut Karyono (2013: 93) banyak teknik pendeteksian *fraud* sesuai dengan jenis *fraud*. Secara umum, upaya mendeteksi fraud antara lain dilakukan dengan:

1. Pengujian pengendalian intern

Meliputi pengujian pelaksanaannya secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif. Contoh: Dalam sistem pengendalian intern diatur bahwa pengeluaran barang dari gudang harus didukung dokumen pengeluaran yang disahkan oleh otorisatornya. Karena adanya kolusi dinyatakan barang yang keluar jumlahnya X kg dan kualitas B. Kenyataanya, barang yang keliat sebenarnya sebanyak Y kg dan kualitasnya A. Jejak barang yang keluar di catatan / akutansinya dan dokumennya adalah sebanyak X kg dan kualitasnya B. Demikian pula bukti dokumennya sehingga bila diteliti tidak terdeteksi bahwa barang yang keluar sebanyak Y kg dengan kualitas A. Apabila dilakukan pengecekan mendadak pada saat barang keluar, barulah kecurangan tersebut terdeteksi.

2. Dengan audit keuangan atau audit operasional

Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkap adanya *fraud*, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga *fraud* dapat terdeteksi.

3. Pengumpulan data intelijen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Cara pendeteksian fraud ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi

seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.

4. Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian dan prosedur. Pengecualian dimaksud antara lain:
  - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan.
  - b. Transaksi-transaksi yang janggal misalnya: waktu transaksi pada hari minggu atau hari libur lain, jumlah frekuensi transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tempat transaksi terlalu menyimpang dari biasanya .
  - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
  - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi. Dari hasil kaji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Salah satu elemen penting dalam pendeteksian fraud adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi terjadinya dan penyebab terjadinya.

## 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian  | Perbedaan   | Hasil   | Penelitian Sekarang   |
|----|--|---|---|---|
| 1. | <p><b>Eka Putri Nastasia, 2012. Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap Kinerja auditor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecerdasan intelektual dimensi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wawasan luas</li> <li>b) Rasional</li> <li>c) Kritis</li> </ol> </li> <li>2. Kecerdasan emosional dimensi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengenalan diri</li> <li>b) Pengendalian diri</li> <li>c) Motivasi</li> <li>d) Empati</li> <li>e) Keterampilan sosial</li> </ol> </li> <li>3. Kecerdasan spiritual dimensi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tingkat religius</li> <li>b) Eksistensi diri</li> <li>c) Sifat positif</li> <li>d) Beretika</li> <li>e) Kepedulian sosial</li> </ol> </li> </ol> | <p>Variabel dependen:</p> <p>a..Kinerja Auditor</p> | <p>Menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor baik secara bersama-sama maupun terpisah</p> | <p>Pengaruh kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecerdasan spiritual dimensi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap fleksibel</li> <li>b. Kesadaran diri</li> <li>c. Menghadapi memanfaatkan penderitaan</li> <li>d. Menghadapi dan melampaui perasaan sakit</li> <li>e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai</li> <li>f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu.</li> <li>g. Kecenderungan untuk berpandangan holistik</li> <li>h. Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” dan berupaya untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar,</li> <li>i. Bersifat mandiri</li> </ol> </li> </ol> |

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Perbedaan | Hasil | Penelitian Sekarang   |
|----|---|-----------|-------|---|
|    | 4. Dimensi kinerja auditor:<br>a) Kemampuan teknis dan analisa<br>b) Karakteristik profesional<br>c) Kemampuan komunikasi |           |       | 2. Kecerdasan emosional dimensi:<br>a. Pengenalan diri<br>b. Pengendalian diri<br>c. Motivasi<br>d. Empati<br>e. Keterampilan sosial<br><br>3. Kecerdasan intelektual dimensi :<br>a. Kemampuan memecahkan masalah<br>b. Intelegensi verbal<br>c. Intelegensi praktis<br><br>4. Dimensi kemampuan mendeteksi kecurangan<br>a. Pengujian pengendalian intern<br>b. Dengan audit keuangan atau audit operasional<br>c. Pengumpulan data intelijen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi<br>d. Penggunaan prinsip pengecualian (expectation) dalam pengendalian dan prosedur |

| No | Nama dan Judul Penelitian  | Perbedaan  | Hasil   | Penelitian Sekarang  |
|----|--|--|---|--|
|    |  |  |   | e. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi<br>f. Pendekatan reaktif |
| 2. | <b>Marcellina Widiyastuti Sugeng Pamudji, 2009. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)</b> | Variabel independen : Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Hal ini berdasarkan hasil pengujian nilai t statistik variabel kompetensi sebesar 2,376 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien parameter yang positif (0,275). Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Hal ini terlihat pada nilai t statistik yang lebih besar dari 1,96 yaitu 2,587 dan nilai koefisien parameter yang positif (0,289).<br>3. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap |  |

| No | Nama dan Judul Penelitian  | Perbedaan  | Hasil   | Penelitian Sekarang |
|----|--|--|---|---------------------|
|    |  |  | <p>kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Hal ini berdasarkan hasil pengujian nilai t statistik yang lebih besar dari yang disyaratkan (1,96) yaitu hanya sebesar 4,204 dan nilai koefisien parameter yang positif (0,298). hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan auditor independen, yang mana dalam penelitian ini menggunakan auditor pemerintah. Ini juga berarti tidak ada perbedaan antara sikap kompetensi, sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme antara auditor independen dengan auditor pemerintah terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud).</p> |                     |
| 3. | <p><b>Herty Safitri Yunintasari, 2010. Pengaruh Independensi dan</b></p> | <p>Variabel independen: Independensi dan Profesionalisme</p> | <p>Membuktikan bahwa beberapa faktor dapat meningkatkan</p>   |                     |

| No | Nama dan Judul Penelitian   | Perbedaan   | Hasil  | Penelitian Sekarang |
|----|---|---|--|---------------------|
| 4. | <p><b>Profesionalisme Auditor Internal Dalam Upaya Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud</b></p> <p><b>Ni Luh Gede Sukmawati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati, 2014. Jurnal mengenai Pengaruh Etika Profesi Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Opini Auditor.</b></p> | <p>Auditor Internal</p> <p>Variabel Independen :<br/>Etika Profesi ,<br/>Opini Auditor.</p> | <p>independensi dan profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud dalam suatu lini perusahaan.</p> <p>Penelitian ini di titik beratkan pada profesi auditor independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bali, karena aktivitas profesi auditor tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga selain harus memahami dan menerapkan etika profesi, mereka juga harus memahami dan menerapkan etika dalam bisnis. Selain memahami etika profesi, seorang auditor dalam memberikan sebuah opini juga harus memahami kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan</p> |                     |

| No | Nama dan Judul Penelitian  | Perbedaan  | Hasil  | Penelitian Sekarang |
|----|--|--|--|---------------------|
| 5. | <b>I Made Pradana Adiputra, Syukriyah Agustini, 2013. Jurnal Internasional Effect of Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence Ethical Attitudes Of Accounting Students</b> | Variabel Independen : Ethical Attitudes Of Accounting Students | spiritual, karena dengan mempunyai ketiga kecerdasan tersebut seorang auditor diharapkan dapat berbuat tegas dalam memberikan opini yang tepat mengenai laporan keuangan kliennya walaupun dalam keadaan tertekan.<br><br>Hasil penelitian membuktikan bahwa Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap etika siswa dalam pemahaman akuntansi. |                     |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Untuk pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran teoritis ini dapat dilihat pada gambar 2.3.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan

kecerdasan intelektual sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan mendeteksi kecurangan.

Kecurangan adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindak kecurangan itu berupa pengambilan atau pencurian harta milik atau aset tersebut. Pelaku kecurangan dapat dari dalam atau luar organisasi dan dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Pelaku kecurangan dari dalam organisasi adalah orang yang dapat akses ke informasi dan akses ke aset organisasi . *Fraud* sulit terdeteksi karena pada hakekatnya *fraud* tersembunyi dan pelakunya pada umumnya cerdas, pekerja keras, dan mempunyai profil seperti orang jujur serta sedikit catatan kriminalnya.

Untuk mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi fraud harus meningkatkan pemahaman dan mempelajari terlebih dahulu tentang teori dan pengertian fraud antara lain jenis, bentuk faktor-faktor pendorong dan penyebab *fraud*. Untuk mencegah *fraud*, perlu dilakukan eliminasi penyebab dan pendorong fraud serta pengendalian internalnya. Sedangkan pendeteksian *fraud* dilakukan dengan mengidentifikasi gejala dan tanda-tanda *fraud* untuk kemudian ditelaah dan dianalisa.

Hasil penelitian Jamal et al. (1995) menunjukkan bahwa sebagian besar auditor (dalam penelitian ini menggunakan partner) tidak mampu mendeteksi kecurangan atau *fraud* dengan baik. Walaupun motivasi, pelatihan dan pengalamannya memadai, para partner yang diuji dapat dikelabui oleh framedari manajemen klien. Ketidakmampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan atau fraud ini ada hubungannya dengan keahlian yang dibentuk oleh pengalaman

yang relevan dengan kecurangan. Kecurangan atau *fraud* itu sendiri frekuensi terjadinya jarang dan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya kecurangan, sehingga pengalaman auditor yang berkaitan dengan kecurangan atau *fraud* tidak banyak. Kemampuan auditor berkaitan erat dengan mendeteksi kecurangan, keterampilan umum dan khusus sangat dibutuhkan dalam mendeteksi *fraud*. Dalam melakukan audit, auditor harus menggunakan keahliannya untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait termasuk penghakiman. Auditor membuat penilaian di mengevaluasi pengendalian internal, mengukur risiko audit, merancang dan menerapkan sampel, menilai dan melaporkan aspek ketidakpastian. Burnaby et al. (2011) menyatakan bahwa auditor dituntut untuk memiliki banyak pengalaman praktis dalam audit terutama dalam mengumpulkan dan menilai bukti audit.

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya. Libby (1995) dalam Koroy (2005) menyatakan bahwa pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (*expertise*). Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam mengungkap tindakan kecurangan (*fraud*) yang kerap terjadi dalam suatu perusahaan.

Penelitian Sularso dan Na'im (1999) tentang analisis pengaruh pengalaman akuntan pada pengetahuan dan penggunaan intuisi dalam mendeteksi kekeliruan didapat hasil akuntan pemeriksa berpengalaman memiliki ketelitian

yang lebih tinggi mengenai kekeliruan, dan akuntan pemeriksa berpengalaman menggunakan intuisi lebih banyak dibandingkan dengan akuntan pemeriksa yang tidak berpengalaman

Auditor adalah seseorang yang memiliki kepercayaan publik, oleh karena itu, auditor harus memiliki kemampuan yang akan digunakannya dalam melaksanakan tugas audit. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki auditor adalah kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang dapat saja terjadi dalam tugas auditnya.

Dari beberapa pernyataan di atas dinyatakan bahwa auditor yang memiliki pengalaman lebih lama dalam menjalankan audit dan sudah melewati banyak tugas pemeriksaan, dapat mendeteksi kekeliruan yang terjadi dan lebih peka terhadap informasi yang diperoleh untuk ketepatan pemberian opini audit. Serta seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Mengingat peranan auditor sangatlah dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka mendorong para auditor untuk memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya. Etika profesi merupakan faktor organisasional yang akan mempengaruhi kinerja seorang auditor. Ada beberapa elemen penting yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, standar pemeriksaan atau auditing, etika profesi dan pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit.

Sehingga syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku. Maka dari itu, etika profesi merupakan sarana pengaturan diri yang sangat menentukan bagi pelaksanaan profesi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Seorang auditor selain wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku, di dalam bekerja hingga menentukan dalam mendeteksi kecurangan, seorang auditor juga dituntut untuk menggunakan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, tidak hanya intelektual saja. Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional, yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku dalam mendeteksi kecurangan.

Apabila di dalam melakukan pemeriksaan atau audit baik auditor junior maupun auditor senior hanya mematuhi etika profesinya saja, tanpa kecerdasan intelektualnya auditor tidak dapat melakukan prosedur audit yang benar karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya baik dalam bidang akuntansi maupun disiplin ilmu lain yang relevan. Dengan demikian kecerdasan intelektual akan memengaruhi kemampuan auditor untuk melakukan pemeriksaan atau audit dengan baik, tepat dan efektif.

Sebagai seorang auditor kecerdasan emosional diperlukan untuk membantu auditor di dalam melakukan pemeriksaan guna mendeteksi kebenaran atas laporan keuangan yang disajikan klien. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2012), yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional akan mempermudah seorang auditor untuk melakukan

pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri atau emosi, rasa empati serta keterampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam menelusuri bukti-bukti audit serta informasi terkait.

Seorang auditor yang memiliki pemahaman atau kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang tinggi, akan mampu bertindak atau berperilaku dengan etis dalam profesinya dan organisasi. Apabila seorang auditor tidak memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, maka seorang auditor tersebut bisa saja melakukan hal yang menyimpang misalnya saja tidak jujur. Dalam profesi akuntan, seorang auditor dituntut integritas, dan kejujuran agar obyektif. Seorang auditor bisa saja tidak jujur karena mendapat honor lebih dari klien. Oleh karena itu *Spiritual Quotient* (SQ) merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotional Quotient* (EQ) secara efektif. Secara singkat kecerdasan spiritual mampu mengintegrasikan dua kemampuan lain yang sebelumnya telah disebutkan yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional (Idrus 2002 dalam Choiriah 2013).

SQ tidak dapat menyelesaikan permasalahan, karena diperlukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosi dan intelektualnya. Jadi seharusnya SQ, EQ, dan IQ pada diri setiap orang mampu secara proporsional bersinergi, menghasilkan kekuatan jiwa raga yang penuh keseimbangan. Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat sebuah model ESQ yang merupakan sebuah keseimbangan *body* (fisik), *Mind* (Psikis) dan *Soul* (Spiritul). Kecerdasan spiritual bekerja maksimal ketika emosi tenang dan terkendali yang diatur oleh kecerdasan

emosional , sehingga akhirnya kecerdasan intelektual bisa mengatur dengan efisien, tepat, cepat serta tetap bergerak pada orbit spiritual ( Augustian, 2003). Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pada fungsi kerjanya ( RM dan Aziza, 2006).

Manusia dengan EQ yang baik , mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab penuh pada pekerjaan, mudah bersosialisasi, mampu membuat keputusan yang manusiawi, dan berpegah teguh pada komitmen. Maka, orang yang EQ-nya yang baguss mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih baik. Perkembangan selanjutnya selain kecerdasan Spiritual (SQ) dan Kecerdasan Emosional(EQ) ternyata manusia memiliki kecerdasan lain yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu kecerdasan Intelektual.

Selama bertaun-taun kecerdasan intelektual (IQ) telah diyakini menjadi ukuran standar kecerdasan seseorang. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio. IQ merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan dan mengolah informasi menjadi fakta. Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak ada informasi yang sulit, semuanya dapat disimpan dan diolah, untuk pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan diolah dan diinformasikan kembali.

Seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi diharapkan menghasilkan kinerja yang baik. Tanpa adanya pengendalian atau kematangan emosi (EQ) dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SQ) sangat sulit bagi seseorang untuk bertahan dalam menghadapi tekanan frustasi, stress, menyelesaikan konflik yang sudah menjadi bagian atau resiko dari profesinyaa

dan memikul tanggung jawab sesuai amanah yang telah diberikan

Pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan, auditor yang memiliki pengalaman cenderung lebih dapat mendeteksi kecurangan dibanding dengan auditor yang memiliki kurang pengalaman.

Auditor tidak hanya memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi untuk menghasilkan kinerja yang baik selain itu harus diseimbangi dengan auditor yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual karena membantu auditor dalam menghadapi dan menangani perasaan mereka dengan baik, tekanan kerja, stress dan memahami dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif sehingga dapat mendeteksi kecurangan secara benar dalam bekerja.

### **2.2.1 Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan**

Selain IQ dan EQ, di beberapa tahun terakhir berkembang kecerdasan spiritual (SQ= *Spiritual Quotients*) yang merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Dengan adanya kecerdasan ini , akan membawa seseorang untuk mencapai kebahagiaan hakikinya. Tanpa adanya kecerdasan spiritual sangat sulit untuk auditor menyelesaikan konflik yang menjadi bagian atau resiko profesi dan memikul tanggung jawab seperti apa yang disebutkan dalam pedoman kode etik akuntan Indonesia serta tidak menyalahgunakan kemampuan dan keahlian merupakah amanah yang dimilikinya

kepada jalan yang tidak dibenarkan. Hasil tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil kinerja mereka ( Afria Lisda, 2009).

Menurut Khavari (2000) dalam Rachmi (2010) kecerdasan spiritual yaitu:

“Kecerdasan spiritual sebagai fakultas dimensi non-material atau jiwa manusia. Kecerdasan spiritual sebagai intan yang belum terasah dan dimiliki oleh setiap insan. Manusia harus mengenali seperti adanya lalu menggosoknysehingga mengkilap dengan tekad yang besar, menggunakannya menuju kearifan, dan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.”

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall (2002) dalam Ludigdo dkk (2006), kecerdasan spiritual adalah:

“Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain”.

Kemampuan bersikap fleksibel yang dimiliki oleh auditor yaitu mampu menyesuaikan diri secara spontan dan aktif untuk mencapai hasil yang baik, memiliki pandangan yang pragmatis (sesuai kegunaan), dan efisien tentang realitas. Kesadaran diri yang tinggi seorang auditor yaitu adanya kesadaran yang tinggi dan mendalam sehingga bisa menyadari berbagai situasi yang datang dan menanggapi. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan situasi yaitu tetap tegar dalam menghadapi permasalahan yang sedang diaudit serta mengambil hikmah dari setiap masalah yang sedang diaudit. Kemampuan untuk menghadapi oleh auditor seseorang yang tidak ingin menambah masalah serta kebencian terhadap sesama sehingga mereka berusaha untuk menahan amarah atau emosinya mengenai masalah yang sedang ditangani. Kualitas hidup yang dimiliki auditor yaitu memiliki pemahaman tentang tujuan hidup dan

memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu yaitu selalu berfikir sebelum bertindak agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Berpandangan Holistik yang dimiliki auditor yaitu melihat bahwa diri sendiri dan orang lain saling terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat memandang kehidupan yang lebih besar sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan, melampaui kesengsaraan dan rasa sehat, serta memandangnya sebagai suatu visi dan mencari makna dibaliknya. Kecenderungan bertanya yaitu kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar unsur-unsur kecenderungan bertanya yang dimiliki auditor yaitu kemampuan berimajinasi dan keingintahuan yang tinggi untuk mencari bukti-bukti menemukan kesalahan yang terjadi. Bersifat mandiri yang dimiliki auditor yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi, seperti mau memberi dan tidak mau menerima hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip seorang auditor.

Dari beberapa pernyataan di atas dinyatakan bahwa auditor yang memiliki kematangan kecerdasan spiritual sangat sulit bagi seorang auditor memikul tanggung jawab seperti apa yang disebutkan dalam Pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, serta untuk tidak menyalah gunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan amanah yang dimilikinya kepada jalan yang tidak dibenarkan, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil kinerja dalam mendeteksi kecurangan.

### **2.2.2 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan**

Namun sejalan dengan tantangan dan suasana kehidupan modern yang

serba kompleks, ukuran standar IQ ini memicu perdebatan sengit dan sekaligus menggairahkan di kalangan akademisi, pendidik, praktisi bisnis dan bahkan publik awam, terutama apabila dihubungkan dengan tingkat kesuksesan atau prestasi hidup seseorang (Arya).

Menurut Ary Ginanjar dalam bukunya "Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ POWER (2011)" kecerdasan emosional yaitu :

"Kecerdasan emosional adalah sebuah kemampuan untuk "mendengarkan", bisikan emosi dan menjadikannya sebagai sumber informasi maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai tujuan".

Menurut Goleman (2005) dalam Tikollah dkk (2006) memberikan definisi bahwa:

“Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain”.

Oleh karena itu Pengenalan diri seorang auditor ditunjukkan dengan adanya kesadaran emosi, dan adanya rasa percaya diri. Seorang auditor juga harus mampu melakukan pengendalian diri dapat dilihat dari adanya sikap kendali diri terhadap dirinya sendiri baik berhadapan dengan orang lain maupun menghadapi dirinya sendiri dan memiliki sifat yang sabar. Motivasinya dapat dilihat dari adanya dorongan prestasi kerja, dan memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Selain itu auditor harus memiliki rasa empati yang ditunjukkan dengan mengetahui dan memahami keadaan sekitar serta dapat memberi nasehat. Keterampilan sosial seorang auditor dapat ditunjukkan dengan mampu berkomunikasi dengan baik dan adanya kemampuan mengorganisasi.

Dengan kata lain tanpa adanya kematangan kecerdasan emosional yang dimiliki auditor sangat sulit bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam

menghadapi tekanan frustrasi, stress, dan menyelesaikan konflik yang sudah menjadi bagian atau resiko profesi sehingga akan berpengaruh terhadap hasil kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan.

### **2.2.3 Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan**

Kecerdasan intelektual menurut Sternberg (2008) dalam Yani (2011) adalah sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berfikir menggunakan proses-proses metakognitif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan (Binet & Simon dalam Azwar, 2004:5), bertindak dengan tujuan tertentu , berpikir rasional, menghadapi lingkungan dengan efektif (Wechler dalam Azwar, 2004:7), serta dalam mengorganisasi pola-pola tingkah laku seseorang sehingga dapat bertindak lebih efektif dan lebih tepat (Freeman dalam Fudyartanta 2004:12).

Menurut Robert L. Solso, Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin (2007) dalam Yani (2011) mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali (*recall*), dan menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun konkret dan hubungan antara objek dan ide, serta menerapkan pengetahuan secara tepat.

Seorang auditor harus memiliki kemampuan memecahkan masalah yaitu mampu menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, mengambil keputusan tepat, menyelesaikan masalah secara optimal,

menunjukkan fikiran jernih. Intelegensi verbal yang dimiliki auditor yaitu kosakata baik, membaca dengan penuh pemahaman, ingin tahu secara intelektual, menunjukkan rasa keingintahuan. Seorang auditor memiliki intelegensi praktis yaitu tahu situasi, tahu cara mencapai tujuan, sadar terhadap dunia keliling, menunjukkan minat terhadap dunia luar.

Dengan demikian Menurut Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya "ESQ POWER" (2011: 65) yaitu:

“Bahwa IQ dan EQ saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja masih ada kecerdasan lain yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya yaitu kecerdasan spiritual. Artinya , IQ memang penting kehadirannya dalam kehidupan manusia, yaitu agar bisa memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan efektivitas. Juga peran EQ yang memegang peran dalam hubungan antar manusia yang efektif serta peran SQ yang mengajarkan peran dalam hubungan antar manusia yang efektif serta peran SQ yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena perlu mensinergikan potensi kecerdasan itu ke dalam satu formula yang dinamakan ESQ Model yaitu formula yang menyatukan unsur IQ, EQ, SQ”.

Dengan kata Ary Ginanjar menyatakan bahwa IQ, EQ dan SQ ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Maka, seorang auditor yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi dianggap bisa menyerap perintah atasan atau lebih cepat memahami dan melakukan pekerjaannya sehingga menghasilkan kinerja yang baik dalam mendeteksi kecurangan.

#### **2.2.4 Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Intelektual Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan**

Peranan auditor sangatlah dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka

mendorong para auditor untuk memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya. Etika profesi merupakan faktor organisasional yang akan mempengaruhi kinerja seorang auditor.

Sehingga syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku. Maka dari itu, etika profesi merupakan sarana pengaturan diri yang sangat menentukan bagi pelaksanaan profesi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Seorang auditor selain wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku, di dalam bekerja hingga menentukan dalam mendeteksi kecurangan, seorang auditor juga dituntut untuk menggunakan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, tidak hanya intelektual saja. Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional, yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku dalam mendeteksi kecurangan.

Kecerdasan merupakan salah satu anugerah terbesar dari Allah SWT kepada manusia. Karena punya kecerdasan inilah, menjadi salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Kecerdasan biasanya merujuk pada kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir dan sebagai tindakan atau pemikiran (Wikipedia). Dengan kecerdasannya, manusia dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang semakin kompleks, melalui proses berfikir dan belajar secara terus-menerus.

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi memecahkan masalah persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan

hidup manusia dalam konteks yang lebih luas dan kaya (Zohar & Marshall, 2002:4) yang memungkinkan seseorang untuk menyatukan hal-hal yang bersifat interpersonal dan intrapersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri dan orang lain (Zohar&Marshall, 2002: 12).

Wujud dari SQ ini adalah sikap moral yang dipandang luhur oleh pelaku (Ummah dkk, 2003 :43). Selain itu SQ berkaitan dengan fitrah manusia sebagai makhluk tuhan dimana, kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita ini yang berhubungan dengan kearifan diluar ego atau jiwa sadar. Spiritual Quotient (SQ) adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita.

Manusia dengan EQ yang baik , mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab penuh pada pekerjaan, mudah bersosialisasi, mampu membuat keputusan yang manusiawi, dan berpegah teguh pada komitmen. Maka, orang yang EQ-nya yang bagus mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih baik. Perkembangan selanjutnya selain kecerdasan Spiritual (SQ) dan Kecerdasan Emosional(EQ) ternyata manusia memiliki kecerdasan lain yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu kecerdasan Intelektual.

Selama bertaun-taun kecerdasan intelektual (IQ) telah diyakini menjadi ukuran standar kecerdasan seseorang. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio. IQ merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan dan mengolah informasi menjadi fakta. Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak ada informasi yang sulit, semuanya dapat disimpan dan diolah, untuk pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan

diolah dan diinformasikan kembali.

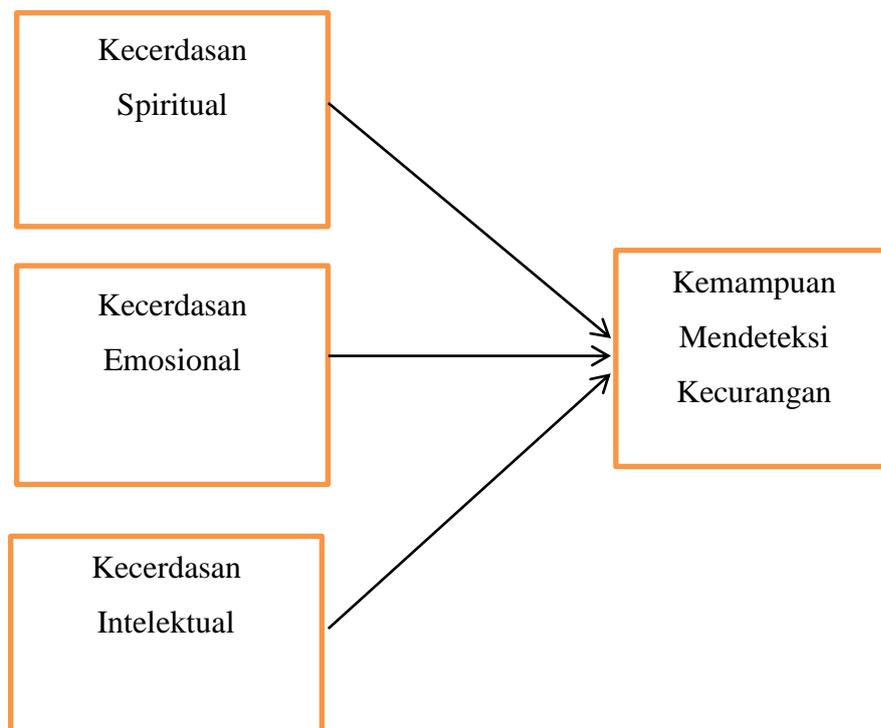
Namun sejalan dengan tantangan dan suasana kehidupan modern yang serba kompleks, ukuran standar IQ ini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, pendidik, praktisi bisnis, dan bahkan publik awam, terutama apabila dihubungkan dengan tingkat kesuksesan atau prestasi kerja bahkan prestasi hidup seseorang. IQ merupakan kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan (Binet & Simon dalam Azwar, 2004:5), bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir rasional, menghadapi lingkungan dengan efektif (Wechsler dalam Azwar 2004: 7), serta dalam mengorganisasikan pola-pola tingkah laku seseorang sehingga dapat bertindak lebih efektif dan lebih tepat (Freeman dalam Fudyartanta, 2004: 12).

Faktor pengalaman memegang peranan yang penting agar auditor dapat mendeteksi adanya tindak kecurangan, karena pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih.

Pengaruh pengalaman akuntan pada pengetahuan dan penggunaan intuisi dalam mendeteksi kekeliruan didapat hasil akuntan pemeriksa berpengalaman memiliki ketelitian yang lebih tinggi mengenai kekeliruan, dan akuntan pemeriksa berpengalaman menggunakan intuisi lebih banyak dibandingkan dengan akuntan pemeriksa yang tidak berpengalaman.

Pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan, auditor yang memiliki pengalaman cenderung lebih dapat mendeteksi kecurangan dibanding dengan auditor yang memiliki kurang pengalaman.

Auditor tidak hanya memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi untuk menghasilkan kinerja yang baik selain itu harus diseimbangi dengan auditor yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual karena membantu auditor dalam menghadapi dan menangani perasaan mereka dengan baik, tekanan kerja, stress dan memahami dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif. Sehingga apabila seorang auditor memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual yang sangat baik, akan mampu bekerja secara optimal dalam mendeteksi kecurangan. Kerangka pemikiran dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono ( 2011:64) pengertian hipotesis adalah :

"Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Dikatakan sementara bahwa jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban *empiric* (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 : Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan.
2. Hipotesis 2 : Kecerdasan Emosional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan
3. Hipotesis 3 : Kecerdasan Intelektual berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan
4. Hipotesis 4 : Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan